

SERI

PERGURUAN
TINGGI
KELAUTAN



2003

CONTOH

Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1997-2003)

Editor:

DIETRIECH G. BENGEN



USAID - INDONESIA COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROJECT
KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003

Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 - 2003

Kutipan: Knight, M. dan S. Tighe, (editor) 2003. Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003; Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA. (5 Seri, 30 Buku, 14 CR-ROM).



Koleksi Proyek Pesisir –Kata Pengantar

Selama lebih dari 30 tahun terakhir, telah terdapat ratusan program —baik internasional, nasional maupun regional— yang diprakarsai oleh pemerintah, serta berbagai organisasi dan kelompok masyarakat di seluruh dunia, dalam upaya menatakelola ekosistem pesisir dan laut dunia secara lebih efektif. USAID (The United States Agency for International Development) merupakan salah satu perintis dalam kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem wilayah pesisir sejak tahun 1985.

Berdasarkan pengalamannya tersebut, pada tahun 1996, USAID memprakarsai Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir (Coastal Resources Management Project—CRMP) atau dikenal sebagai Proyek Pesisir, sebagai bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam (Natural Resources Management Program). Program ini direncanakan dan diimplementasikan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), dan dengan dukungan Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI) di Amerika Serikat. Kemitraan USAID dengan CRC/URI merupakan kerja sama yang amat penting dalam penyelenggaraan program-program pengelolaan sumberdaya pesisir di berbagai negara yang didukung oleh USAID selama hampir dua dasawarsa. CRC/URI mendisain dan mengimplementasikan program-program lapangan jangka panjang yang bertujuan membangun kapasitas menata-keelola wilayah pesisir yang efektif di tingkat lokal dan nasional. Lembaga ini juga melaksanakan analisis dan berbagi pengalaman tentang pembelajaran yang diperoleh dari dan melalui proyek-proyek lapangan, lewat program-program pelatihan, publikasi, dan partisipasi di forum-forum internasional.

Ketika CRC/URI memulai aktivitasnya di Indonesia sebagai mitra USAID dalam program pengelolaan sumberdaya pesisirnya (CRMP, atau dikenal dengan Proyek Pesisir), telah ada beberapa program pengelolaan pesisir dan kelautan yang sedang berjalan. Program-program tersebut umumnya merupakan proyek besar, sebagian kecil di antaranya telah mencapai tahap implementasi. CRC/URI mendisain Proyek Pesisir untuk lebih berorientasi pada implementasi dalam mempromosikan pengelolaan wilayah pesisir dan tujuan-tujuan strategis USAID, seperti pengembangan ekonomi dan keamanan pangan, perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan konflik, demokrasi partisipatoris, dan perlindungan kelestarian lingkungan melalui pengelolaan sumberdaya pesisir dan air.

Kegiatan Proyek Pesisir menempatkan Indonesia di garis depan pengembangan model baru dan peningkatan informasi baru yang bermanfaat bagi Indonesia sendiri dan negara-negara lain di dunia dalam hal pengelolaan sumberdaya pesisir. Sebagai negara keempat terbesar di dunia, dengan kurang lebih 60 persen dari 230 juta penduduknya tinggal di dalam radius 50 kilometer dari pesisir, Indonesia secara sempurna berada pada posisi untuk mempengaruhi dan memformulasikan strategi-strategi pengembangan pengelolaan pesisir negara-negara berkembang di seluruh dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.500 pulau, 81.000 kilometer garis pantai, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 5,8 juta



CRMP/Indonesia Collection

–Preface

Over the past 30 years, there have been hundreds of international, national and sub-national programs initiated by government, organizations and citizen groups that attempted to more effectively govern the world's coastal and marine ecosystems. Among these efforts, the U.S. Agency for International Development (USAID) has been a pioneer since 1985 in working with developing countries to improve the management of their coastal ecosystem to benefit coastal people and their environment.

Building on its experience, as part of its Natural Resources Management Program, USAID initiated planning for the Indonesia Coastal Resources Management Project (CRMP, or Proyek Pesisir) in 1996. This program was planned and implemented in cooperation with the Government of Indonesia through its National Development Planning Agency (BAPPENAS) and with the support of the Coastal Resources Center at the University of Rhode Island (CRC/URI) in the United States. USAID's partnership with CRC/URI has been central to the delivery of coastal resources management programs to numerous USAID-supported countries for almost two decades. CRC/URI designs and implements long-term field programs that work to build the local and national capacity to effectively practice coastal governance. It also carries out analyses and shares experiences drawn from within and across field projects. These lessons learned are disseminated worldwide through training programs, publications and participation in global forums.

When CRC/URI initiated work in Indonesia as a partner with USAID in its international Coastal Resources Management Program, there were numerous marine and coastal programs already ongoing. These were typically large planning projects; few projects had moved forward into "on-the-ground" implementation. CRC/URI designed Indonesia's CRMP to be "implementation oriented" in promoting coastal governance and the USAID strategic goals of economic development and food security, protection of human health, prevention of conflicts, participatory democracy and environmental protection through integrated management of coasts and water resources.

The CRMP put Indonesia in the forefront of developing new models and generating new information useful in Indonesia, and in other countries around the world, for managing coastal resources. Being the fourth largest country in the world, with approximately 60 percent of its 230 million people living within 50 kilometers of the coast, Indonesia is perfectly positioned to influence and shape the coastal management development strategies of other developing countries around the world. It is the world's largest archipelago state, with 17,500 islands, 81,000 kilometers of coastline, and an Exclusive Economic Zone covering 5.8 million square kilometers of sea –more than three times its land area. Indonesia is also the richest country in the world in terms of marine bio-

kilometer laut persegi -lebih tiga kali luas daratannya. Indonesia menjadi negara terkaya di dunia dalam hal keragaman hayati (biodiversity). Sumber daya pesisir dan laut Indonesia memiliki arti penting bagi dunia internasional, mengingat spesies flora dan fauna yang ditemukan di perairan tropis Indonesia lebih banyak daripada kawasan manapun di dunia. Sekitar 24 persen dari produksi ekonomi nasional berasal dari industri-industri berbasis wilayah pesisir, termasuk produksi gas dan minyak, penangkapan ikan, pariwisata, dan transportasi. Beragam ekosistem laut dan pesisir yang ada menyediakan sumberdaya lestari bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Hasil-hasil lautnya mencukupi lebih dari 60 persen rata-rata kebutuhan bahan protein penduduk secara nasional, dan hampir 90 persen di sebagian desa pesisir. Masyarakat nelayan pedesaan cenderung menjadi bagian dari kelompok masyarakat termiskin akibat eksploitasi berlebihan, degradasi sumberdaya, serta ketidakmampuan dan kegagalan mereka memanfaatkan sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

Di bawah bimbingan CRC/URI, Proyek Pesisir, yang berkantor pusat di Jakarta, bekerja sama erat dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, LSM, kelompok-kelompok ilmiah, dan seluruh jajaran pemerintahan. Program-program lapangan difokuskan di Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Provinsi Lampung (sebelah selatan Sumatera) ditambah Provinsi Papua pada masa akhir proyek. Selain itu, dikembangkan pula pusat pembelajaran pada Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) di Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai perguruan tinggi yang menjadi mitra implementasi Proyek Pesisir dan merupakan fasilitator dalam pengembangan Jaringan Universitas Pesisir Indonesia (INCUNE).

Komponen program CRMP yang begitu banyak dikembangkan dalam 3 (tiga) lingkup strategi pencapaian tujuan proyek. Pertama, **kerangka kerja** yang mendukung upaya-upaya pengelolaan berkelanjutan, telah dikembangkan. Kemudian, ketika proyek-proyek percontohan telah rampung, **pengalaman-pengalaman dan teladan baik dari kegiatan-kegiatan tersebut didokumentasikan dan dilembagakan dalam pemerintahan**, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam jangka panjang untuk melanjutkan hasil yang sudah ada sekaligus menambah lokasi baru. Kegiatan ini dilakukan lewat kombinasi **perangkat hukum, panduan, dan pelatihan**. Kedua, Departemen Kelautan dan Perikanan yang baru berdiri didukung untuk mengembangkan **peraturan perundangan dan panduan pengelolaan wilayah pesisir nasional untuk pengelolaan pesisir terpadu yang terdesentralisasi**. Pengembangan peraturan perundangan ini dilakukan melalui suatu proses konsultasi publik yang partisipatif, terbuka dan melembaga, yang berupaya mengintegrasikan inisiatif-inisiatif pengelolaan wilayah pesisir secara vertikal dan horisontal. Ketiga, proyek ini mengakui dan berupaya **memperkuat peran khas yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam mengisi kesenjangan kapasitas pengelolaan wilayah pesisir**.

Strategi-strategi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip:

- **Partisipasi** luas dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pemberdayaan mereka dalam pengambilan keputusan
- **Koordinasi** efektif berbagai sektor, antara masyarakat, dunia usaha, dan LSM pada berbagai tingkatan
- Penitikberatan pada **pengelolaan yang terdesentralisasi** dan kesesuaian antara pengelolaan/pengaturan di tingkat lokal dan nasional
- Komitmen untuk menciptakan dan **memperkuat kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia** untuk pengelolaan pesisir terpadu yang berkelanjutan
- Pembuatan **kebijakan yang lebih baik yang berbasis informasi dan ilmu pengetahuan**

Di **Sulawesi Utara**, fokus awal Proyek Pesisir terletak pada pengembangan praktik-praktik terbaik pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat, termasuk pembuatan dan implementasi rencana daerah perlindungan laut (DPL), daerah perlindungan mangrove (DPM), dan pengelolaan pesisir tingkat desa, serta pemantauan hasil-hasil proyek dan kondisi wilayah pesisir. Untuk melembagakan kegiatan-kegiatan yang sukses ini, dan dalam rangka memanfaatkan aturan otonomi daerah yang baru diberlakukan, Proyek Pesisir membantu penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir, baik berupa Peraturan Desa, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten, maupun Perda Provinsi. Selain itu, dikembangkan pula perangkat informasi sebagai alat bagi pengelolaan wilayah pesisir, seperti pembuatan atlas wilayah pesisir. Dalam kurun waktu 18 bulan terakhir, kegiatan perluasan program (scaling up) juga telah berhasil diimplementasikan di 25 desa pesisir di Kecamatan Likupang

diversity. Indonesia's coastal and marine resources are of international importance with more plant and animal species found in Indonesia's waters than in any other region of the world. Approximately 24 percent of national economic output is from coastal-based industries such as oil and gas production, fishing, tourism and transportation. Coastal and marine ecosystems provide subsistence resources for many Indonesians, with marine products comprising on average more than 60 percent of the protein intake by people, and nearly 90 percent in some coastal villages. Rural coastal communities tend to be among the poorest because of overexploitation and degradation of resources resulting from their inability to sustainably and successfully plan for and manage their coastal resources.

Under the guidance of CRC/URI, the Jakarta-based CRMP worked closely with resource users, the community, industry, non-governmental organizations, academic groups and all levels of government. Field programs were focused in North Sulawesi, East Kalimantan, and Lampung Province in South Sumatra, with an additional site in Papua in the last year of the project. In addition, a learning center, the Center for Coastal and Marine Resources Studies, was established at Bogor Agricultural Institute, a CRMP implementation partner and facilitator in developing the eleven-member Indonesia Coastal University Network (INCUNE).

The many components of the CRMP program were developed around three strategies for achieving the project's goals. First, **enabling frameworks** for sustained management efforts were developed. Then, as pilot projects were completed, **experiences and good practices were documented and institutionalized within government**, which has the long-term responsibility to both sustain existing sites and launch additional ones. This was done through a combination of **legal instruments, guidebooks and training**. Second, the new Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) was supported to develop a **national coastal management law and guidelines for decentralized integrated coastal management (ICM)** in a widely participatory, transparent and now institutionalized public consultative process that attempted to vertically and horizontally integrate coastal management initiatives. Finally, the project recognized and worked to **strengthen the unique role that universities play in filling the capacity gap for coastal management**.

The strategies were based on several important principles:

- Broad stakeholder **participation** and empowerment in decision making
- Effective **coordination** among sectors, between public, private and non-governmental entities across multiple scales
- Emphasis on **decentralized governance** and compatibility between local and national governance
- Commitment to creating and **strengthening human and organizational capacity** for sustainable ICM
- Informed and **science-based decision making**

In **North Sulawesi**, the early CRMP focus was on developing community-based ICM best practices including creating and implementing marine sanctuaries, mangrove sanctuaries and village-level coastal management plans, and monitoring project results and coastal conditions. In order to institutionalize the resulting best practices, and to take advantage of new decentralized authorities, the CRMP expanded activities to include the development of village, district and provincial coastal management laws and information tools such as a coastal atlas. In the last 18 months of the project, a scaling-up program was successfully implemented that applied community-based ICM lessons learned from four original village pilot sites to Likupang sub-district (kecamatan) with 25 coastal villages. By the end of the project, Minahasa district was home to 25 community coral reef sanctuaries, five mangrove sanctuaries and thirteen localized coastal management plans. In

Barat dan Timur. Perluasan program ini dilakukan dengan mempraktikkan berbagai hasil pembelajaran mengenai pengelolaan pesisir terpadu berbasis masyarakat dari 4 lokasi percontohan awal (Blongko, Benteran, Tumbak, dan Talise). Pada akhir proyek, Kabupaten Minahasa telah memiliki 25 DPL, 5 DPM, dan 13 rencana pengelolaan pesisir tingkat desa yang telah siap dijalankan. Sulawesi Utara juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Kalimantan Timur**, fokus dasar Proyek Pesisir adalah pengenalan model pengelolaan pesisir berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS), yang menitikberatkan pada rencana pengelolaan terpadu Teluk Balikpapan dan DAS-nya. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan (RPTB) berbasis DAS yang bersifat interyurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Rencana pengelolaan tersebut, yang dirampungkan dengan melibatkan partisipasi dan konsultasi masyarakat lokal secara luas, dalam implementasinya telah berhasil menghentikan konversi lahan mangrove untuk budidaya udang di sebuah daerah delta, terbentuknya kelompok kerja (pokja) terpadu antarinstansi untuk masalah erosi dan mangrove, terbentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) berbasis masyarakat yang pro aktif, dan jaringan Ornop yang didanai oleh sektor swasta yang berfokus pada isu-isu masyarakat pesisir. Selain itu, telah terbentuk Badan Pengelola Teluk Balikpapan, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur berikut 3 Bupati (Penajam Paser Utara, Paser, dan Kutai Kartanegara), dan Walikota Balikpapan. Seluruh kepala daerah tersebut, bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, ikut menandatangani Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan tersebut. Rencana Pengelolaan Teluk Balikpapan ini telah mendorong pemerintah daerah lain untuk memulai program-program serupa. Kalimantan Timur juga telah ditetapkan sebagai pusat regional untuk Program Kemitraan Bahari berbasis perguruan tinggi, yang disponsori oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dan difasilitasi oleh Proyek Pesisir.

Di **Lampung**, kegiatan Proyek Pesisir berfokus pada proses penyusunan rencana dan pengelolaan strategis provinsi secara partisipatif. Upaya ini menghasilkan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, yang untuk pertama kalinya menggambarkan kualitas dan kondisi sumberdaya alam suatu provinsi melalui kombinasi perolehan informasi terkini dan masukan dari 270 stakeholders setempat, serta 60 organisasi pemerintah dan non pemerintah. Atlas tersebut menyediakan landasan bagi pengembangan sebuah rencana strategis pesisir dan program di Lampung, dan sarana pembelajaran bagi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, yang telah menangani program pengelolaan pesisir di Lampung. Sebagai contoh kegiatan pelaksanaan awal tingkat lokal dari Rencana Strategis Pesisir Provinsi Lampung, dua kegiatan berbasis masyarakat telah berhasil diimplementasikan. Satu berlokasi di Pematang Pasir, dengan titik berat pada praktik budidaya perairan yang berkelanjutan, dan yang lainnya berlokasi di Pulau Sebesi di Teluk Lampung, dengan fokus pada pembentukan dan pengelolaan daerah perlindungan laut (DPL). Model Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung tersebut belakangan telah direplikasi oleh setidaknya 9 (sembilan) provinsi lainnya di Indonesia dengan menggunakan anggaran provinsi masing-masing.

Di **Papua**, pada tahun terakhir Proyek Pesisir, sebuah atlas pesisir untuk kawasan Teluk Bintuni - yang disusun berdasarkan penyusunan Atlas Lampung-telah diproduksi. Kawasan ini merupakan daerah yang lingkungannya sangat penting, yang tengah berada pada tahap awal aktivitas pembangunan besar-besaran. Teluk Bintuni berlokasi pada sebuah kabupaten baru yang memiliki sumberdaya alam melimpah, termasuk cadangan gas alam yang sangat besar, serta merupakan daerah yang diperkirakan memiliki paparan mangrove terbesar di Asia Tenggara. Proses penyusunan atlas sumberdaya pesisir kawasan Teluk Bintuni ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan Ornop lokal, perusahaan minyak BP, dan Universitas Negeri Papua (UNIPA). Kegiatan ini mengawali sebuah proses perencanaan partisipatif dan pengelolaan pesisir terpadu, yang mengarah kepada mekanisme-mekanisme perencanaan partisipatif untuk sumberdaya pesisir di kawasan tersebut. Para mitra-mitra lokal telah menunjukkan ketertarikan untuk menggunakan Atlas Teluk Bintuni sebagai rujukan awal (starting point) dalam mengembangkan 'praktik-praktik terbaik' mereka sendiri, misalnya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat dan pengelolaan teluk berbasis DAS bagi Teluk Bintuni.

the last few months, due to its significant capacity in coastal management, North Sulawesi was inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **East Kalimantan**, the principal CRMP focus was on introducing a model for watershed-based coastal management focusing on developing an integrated coastal management plan for Balikpapan Bay and its watershed. Balikpapan Bay is the commercial and industrial hub of East Kalimantan Province. The resulting inter-jurisdictional watershed-based Balikpapan Bay Management Plan (BBMP) was the first of its kind in Indonesia and provides a model for other regional governments. The BBMP, completed with extensive local participation and consultation, has already resulted in a moratorium on shrimp mariculture in one delta region, the creation of mangrove and erosion interdepartmental working groups, a new proactive community-based NGO and a NGO-network supported by private sector funding that is focused on coastal community issues. The BBMP also resulted in the formation of the Balikpapan Bay Management Council, chaired by the Provincial Governor and including the heads of three districts (Panajam Paser Utara, Pasir and Kutai Kartengara), the Mayor of the City of Balikpapan and the Minister of Marine Affairs and Fisheries, who were all co-signatories to the BBMP. The BBMP has already stimulated other regional governments to start on similar programs. In the last few months, East Kalimantan was also inaugurated as a founding regional center for the new national university-based Sea Partnership Program sponsored by the MMAF and facilitated by the CRMP.

In **Lampung**, the CRMP focused on establishing a participatory provincial strategic planning and management process. This resulted in the ground-breaking Lampung Coastal Resources Atlas, which defines for the first time the extent and condition of the province's natural resources through a combination of existing information and the input of over 270 local stakeholders and 60 government and non-government organizations. The atlas provided the foundation for the development of a Lampung coastal strategic plan and the program served as a learning site for Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies that has since adopted the management of the Lampung coastal program. As a demonstration of early local actions under the Lampung Province Coastal Strategic Plan, two community-based initiatives - one in Pematang Pasir with an emphasis on sustainable aquaculture good practice, and the other on Sebesi Island in Lampung Bay focused on marine sanctuary development and management - were implemented. The atlas model was later replicated by at least nine other provinces using only provincial government funds.

In **Papua**, in the final year of Proyek Pesisir, a coastal atlas based upon the Lampung atlas format was produced for Bintuni Bay, an environmentally important area that is in the early stages of major development activities. Bintuni Bay is located within the newly formed Bintuni District that is rich in natural resources, including extensive natural gas reserves, and perhaps the largest contiguous stand of mangroves in Southeast Asia. The atlas development process was implemented in cooperation with local NGOs, the petroleum industry (BP) and the University of Papua and began a process of participatory planning and integrated coastal management that is leading to mechanisms of participatory planning for the coastal resources in the area. Local partners have expressed their interest in using the Bintuni Bay atlas as a starting point for developing their own set of "best practices" such as community-based coastal management and multi-stakeholder, watershed-based bay management for Bintuni Bay.

Pengembangan Universitas merupakan aspek penting dari kegiatan Proyek Pesisir dalam mengembangkan pusat keunggulan pengelolaan pesisir melalui sistem Perguruan Tinggi di Indonesia, dan memanfaatkan pusat ini untuk membangun kapasitas universitas-universitas lain di Indonesia. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) yang dikembangkan di Institut Pertanian Bogor (IPB) telah dipilih sebagai mitra utama, mengingat posisinya sebagai institusi pengelolaan sumberdaya alam utama di Indonesia. Selain mengelola Lampung sebagai daerah kajian, PKSPL-IPB mendirikan perpustakaan sebagai referensi pengelolaan pesisir terpadu nasional, yang terbuka bagi para mahasiswa dan kalangan profesional, serta menyediakan layanan peminjaman perpustakaan antaruniversitas untuk berbagai perguruan tinggi di Indonesia (situs web: <http://www.indomarine.or.id>). PKSPL-IPB telah memprakarsai lokakarya tahunan pembelajaran pengelolaan pesisir terpadu, penerbitan jurnal pesisir nasional, serta bekerja sama dengan Proyek Pesisir mengadakan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yang kini menjadi ajang utama bagi pertukaran informasi dan studi kasus pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Kegiatan dua tahunan tersebut dihadiri 600 peserta domestik dan internasional. Berdasarkan pengalaman positif dengan IPB dan PKSPL tersebut, telah dibentuk sebuah jaringan universitas yang menangani masalah pengelolaan pesisir yaitu INCUNE (Indonesian Coastal Universities Network), yang beranggotakan 11 universitas. Jaringan ini menyatukan universitas-universitas di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, yang dibentuk dengan tujuan untuk pertukaran informasi, riset, dan pengembangan kapasitas, dengan PKSPL-IPB berperan sebagai sekretariat. Selain INCUNE, Proyek Pesisir juga memegang peranan penting dalam mengembangkan Program Kemitraan Bahari (PKB) di Indonesia, mengambil contoh keberhasilan Program Kemitraan Bahari (Sea Grant College Program) di Amerika Serikat. Program ini mencoba mengembangkan kegiatan penjangkauan, pendidikan, kebijakan, dan riset terapan wilayah pesisir di berbagai universitas penting di kawasan pesisir Indonesia. Program Kemitraan Bahari menghubungkan universitas di daerah dengan pemerintah setempat melalui isu-isu yang menyentuh kepentingan pemerintah lokal dan masyarakat, serta berupaya mengatasi kesenjangan dalam kapasitas perorangan dan kelembagaan di daerah.

Proyek Pesisir mengembangkan usaha-usaha di tingkat **nasional** untuk memanfaatkan peluang-peluang baru yang muncul, seiring diberlakukannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Pada periode 2000-2003, Proyek Pesisir bekerja sama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan, BAPPENAS, instansi nasional lainnya, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi dalam menyusun rancangan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (RUU PWP). Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu rancangan undang-undang yang disusun secara partisipatif dan transparan sepanjang sejarah Indonesia. Saat ini RUU tersebut sedang dipertimbangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). RUU disusun berbasis insentif dan bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat lokal dalam memperoleh hak-hak mereka yang berkaitan dengan isu-isu desentralisasi daerah dalam pengelolaan pesisir. Dukungan lain yang diberikan Proyek Pesisir kepada Departemen Kelautan dan Perikanan adalah upaya mengembangkan kapasitas dari para staf, perencanaan strategis, dan dibentuknya program baru yang bersifat desentralistik seperti Program Kemitraan Bahari.

Koleksi dokumen dan bahan bacaan ini bertujuan untuk mendokumentasikan pengalaman-pengalaman Proyek Pesisir dalam mengelola wilayah pesisir, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada publik untuk mengaksesnya, serta untuk mentransfer dokumen tersebut kepada seluruh mitra, rekan kerja, dan sahabat-sahabat Proyek Pesisir di Indonesia. Produk utama dari koleksi ini adalah ***Pembelajaran dari Dunia Pengelolaan Pesisir di Indonesia***, yang dibuat dalam bentuk Compact Disc-Read Only Memory (CD-ROM), berisikan gambaran umum mengenai Proyek Pesisir dan produk-produk penting yang dihasilkannya. Adapun Koleksi Proyek Pesisir ini terbagi kedalam 5 tema, yaitu:

- **Seri Reformasi Hukum**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir tentang proses penyusunan rancangan undang-undang/peraturan kabupaten, provinsi, dan nasional yang berbasis masyarakat, serta kebijakan tentang pengelolaan pesisir dan batas laut
- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Regional**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), profil atlas dan geografis pesisir Lampung, Balikpapan, Sulawesi Utara, dan Papua

University development was an important aspect of the CRMP, and the marine center at Bogor Agricultural Institute, the premier natural resources management institution in Indonesia, was its primary partner, and was used to develop capacity in other universities. In addition to managing the Lampung site, the Center for Coastal and Marine Resources Studies established a national ICM reference library that is open to students and professionals, and provides an inter-university library loan service for other universities in Indonesia (Website: <http://www.indomarine.or.id>). The Center initiated an annual ICM learning workshop, a national peer-reviewed coastal journal and worked with the CRMP to establish a national coastal conference that is now the main venue for exchange of information and case studies on ICM in Indonesia, drawing over 600 Indonesian and international participants to its bi-annual meeting. Building from the positive experience with Bogor and its marine center, an Indonesia-wide network of 11 universities (INCUNE) was developed that tied together key coastal universities across the nation for information exchange, academic research and capacity development, with the Center for Coastal and Marine Resources Studies serving as the secretariat. In addition to INCUNE, the CRMP was instrumental in developing the new Indonesia Sea Partnership Program, modeled after the highly successful U.S. Sea Grant College Program, that seeks to develop coastal outreach, education, policy and applied research activities in key regional coastal universities. This program, sponsored by MMAF, connects regional universities with local governments and other stakeholders through issues that resonate with local government and citizens, and addresses the gap of human and institutional capacity in the regions.

National level efforts expanded to take advantage of new opportunities offered by new laws on regional autonomy. From 2000 to 2003, the CRMP worked closely with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, the National Development Planning Agency (BAPPENAS), other national agencies, regional government partners, NGOs and universities to develop a new national coastal management law. The National Parliament is now considering this law, developed through one of the most participatory and transparent processes of law development in the history of Indonesia. The draft law is incentive-based and focuses on encouraging local governments, NGOs and citizens to assume their full range of coastal management authority under decentralization on issues of local and more-than-local significance. Other support was provided to the MMAF in developing their own organization and staff, in strategic planning, and in creating new decentralized programs such as the Sea Partnership Program.

The collection of CRMP materials and resources contained herein was produced to document and make accessible to a broader audience the more recent and significant portion of the CRMP's considerable coastal management experience, and especially to facilitate its transfer to our Indonesian counterparts, colleagues and friends. The major product is **Learning From the World of Coastal Management in Indonesia**, a CD-ROM that provides an overview of the CRMP (Proyek Pesisir) and its major products. The collection is organized into five series related to general themes. These are:

- **Coastal Legal Reform Series**, which includes the experience and guidance from the CRMP regarding the development of community-based, district, provincial and national laws and policies on coastal management and on marine boundaries
- **Regional Coastal Management Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding watershed planning and management, and the geographical and map profiles from Lampung, Balikpapan, North Sulawesi and Papua

- **Seri Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat**, berisikan pengalaman dan panduan Proyek Pesisir dan desa-desa percontohnya di Sulawesi Utara mengenai keberhasilan kegiatan, serta proses pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Perguruan Tinggi**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB mengenai peranan dan keberhasilan perguruan tinggi dalam pengelolaan pesisir
- **Seri Pemantauan Pesisir**, berisikan pengalaman, panduan, dan rujukan Proyek Pesisir mengenai pemantauan sumberdaya pesisir oleh masyarakat dan pemangku kepentingan, khususnya pengalaman dari Sulawesi Utara

Kelima seri ini berisikan berbagai **Studi Kasus**, **Buku Panduan**, **Contoh-contoh**, dan **Katalog** dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (**CD-ROM**), tergantung isi setiap topik dan pengalaman dari proyek. Material dari seri-seri ini ditampilkan dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Sedianya, sebagian besar dokumen akan tersedia baik dalam Bahasa Indonesia maupun Inggris. Namun karena keterbatasan waktu, hingga saat koleksi ini dipublikasikan, belum semua dokumen dapat ditampilkan dalam dua bahasa tersebut. Masing-masing dokumen dalam tiap seri berbeda, tetapi fungsinya saling mendukung satu sama lain, yaitu:

- **Studi Kasus**, mendokumentasikan pengalaman Proyek Pesisir, dibuat secara kronologis pada hampir semua kasus, dilengkapi dengan pembahasan dan komentar mengenai proses dan alasan terjadinya berbagai hal yang dilakukan. Dokumen ini biasanya berisikan rekomendasi-rekomendasi umum dan pembelajaran, dan sebaiknya menjadi dokumen yang dibaca terlebih dahulu pada tiap seri yang disebutkan di atas, agar pembaca memahami topik yang disampaikan.
- **Panduan**, memberikan panduan mengenai proses kegiatan kepada para praktisi yang akan mereplikasi atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang berhasil dikembangkan Proyek Pesisir. Mereka akan merujuk pada **Studi Kasus** dan **Contoh-contoh**, dan sebaiknya dibaca setelah dokumen **Studi Kasus** atau **Contoh-contoh**.
- **Contoh-contoh**, berisikan pencetakan ulang atau sebuah kompilasi dari material-material terpilih yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh proyek untuk suatu daerah tematik tertentu. Dalam dokumen ini terdapat pendahuluan ringkas dari setiap contoh-contoh yang ada serta sumber berikut fungsi dan perannya dalam kelima seri yang ada. Dokumen ini terutama digunakan sebagai rujukan bagi para praktisi, serta digunakan bersama-sama dengan dokumen **Studi Kasus** dan **Panduan**, sehingga hendaknya dibaca setelah dokumen lainnya.
- **Katalog**, berisikan daftar atau data yang dihasilkan pada daerah tematik dan telah disertakan ke dalam **CD-ROM**.
- **CD-ROM**, berisikan file elektronik dalam format aslinya, yang berfungsi mendukung dokumen-dokumen lainnya seperti diuraikan di atas. Isi CD-ROM tersebut bervariasi tiap seri, dan ditentukan oleh penyunting masing-masing seri, sesuai kebutuhan.

Beberapa dokumen dari Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini dapat diakses melalui internet di situs Coastal Resources Center (<http://www.crc.uri.edu>), PKSPL-IPB (<http://www.indomarine.or.id>), dan Proyek Pesisir (<http://www.pesisir.or.id>).

Pengantar ini tentunya belum memberikan gambaran detail mengenai seluruh kegiatan, pekerjaan, dan produk-produk yang dihasilkan Proyek Pesisir selama tujuh tahun programnya. Karena itu, kami mempersilakan pembaca untuk dapat lebih memahami seluruh komponen dari koleksi dokumen ini, sembari berharap bahwa koleksi ini dapat bermanfaat bagi para manajer pesisir, praktisi, ilmuwan, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam meneruskan model-model dan kerangka kerja yang telah dikembangkan oleh Proyek Pesisir dan mitra-mitranya. Kami amat optimis mengenai masa depan pengelolaan pesisir di Indonesia, dan bangga atas kerja sama yang baik yang telah terjalin dengan seluruh pihak selama program ini berlangsung. Kami juga gembira dan bangga atas diterbitkannya Koleksi Dokumen Proyek Pesisir ini.

- **Community-Based Coastal Resource Management Series**, which includes the experience, and guidance from the CRMP and its North Sulawesi villages regarding best practices and the process for engaging communities in coastal stewardship
- **Coastal University Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP and the Center for Coastal and Marine Resources Studies regarding the role and accomplishments of universities in coastal management
- **Coastal Monitoring Series**, which includes the experience, guidance and references from the CRMP regarding community and stakeholder monitoring of coastal resources, primarily from the North Sulawesi experience

These five series contain various **Case Studies**, **Guidebooks**, **Examples** and **Catalogues** in hard copy and in **CD-ROM** format, depending on the content of the topic and experience of the project. They are reproduced in either the English or Indonesian language. Most of the materials in this set will ultimately be available in both languages but cross-translation on some documents was not complete at the time of publishing this set. The individual components serve different, but complementary, functions:

- **Case Studies** document the CRMP experience, chronologically in most cases, with some discussion and comments on how or why things occurred as they did. They usually contain general recommendations or lessons learned, and should be read first in the series to orient the reader to the topic.
- **Guidebooks** are “How-to” guidance for practitioners who wish to replicate or adapt the best practices developed in the CRMP. They will refer to both the **Case Studies** and the **Examples**, so should be read second or third in the series.
- **Examples** are either exact reprints of key documents, or a compilation of selected materials produced by the project for the thematic area. There is a brief introduction before each example as to its source and role in the series, but they serve primarily as a reference to the practitioner, to be used with the **Case Studies** or **Guidebooks**, and so should be read second or third in the series.
- **Catalogues** include either lists or data produced by the project in the thematic area and have been included on the **CD-ROMs**.
- **CD-ROMs** include the electronic files in their original format that support many of the other documents described above. The content of the CD-ROMs varies from series to series, and was determined by the individual series editors as relevant.

Several of the documents produced in this collection of the CRMP experiences are also available on the Internet at either the Coastal Resources Center website (<http://www.crc.uri.edu>), the Bogor Agricultural Institute website (<http://www.indomarine.or.id>) and the Proyek Pesisir website (<http://www.pesisir.or.id>).

This preface cannot include a detailed description of all activities, work, products and outcomes that were achieved during the seven-year CRMP program and reflected in this collection. We encourage you to become familiar with all the components of the collection, and sincerely hope it proves to be useful to coastal managers, practitioners, scientists, NGOs and others engaged in furthering the best practices and frameworks developed by the USAID/BAPPENAS CRMP and its counterparts. We are optimistic about the future of coastal management in Indonesia, and have been proud to work together during the CRMP, and in the creation of this collection of CRMP (Proyek Pesisir) products.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mitra di Indonesia, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya, yang telah memberikan dukungan, komitmen, semangat, dan kerja keras mereka dalam membantu menyelesaikan Proyek Pesisir dan segenap kegiatannya selama 7 tahun terakhir. Tanpa partisipasi, keberanian untuk mencoba hal yang baru, dan kemauan untuk bekerja bahu-membahu -baik dari pihak pemerintah, LSM, universitas, masyarakat, dunia usaha, para ahli, dan lembaga donor-'keluarga besar' pengelolaan pesisir Indonesia tentu tidak akan mencapai kemajuan pesat seperti yang ada sekarang ini.



Dr. Anne Patterson
Direktur
Kantor Pengelolaan Sumber Daya Alam
U.S. Agency for International Development/
Indonesia (USAID)



Maurice Knight
Chief of Party
Proyek Pesisir
Coastal Resources Center
University of Rhode Island



Dr. Widi A. Pratikto
Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Departemen Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia



Dr. Dedi M.M. Riyadi
Deputi Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS
Bidang Sumberdaya Alam dan
Lingkungan Hidup

25 Agustus 2003

We would like to acknowledge and extend our deepest appreciation to all of our partners in Indonesia, the USA and other countries who have contributed their support, commitment, passion and effort to the success of CRMP and its activities over the last seven years. Without your participation, courage to try something new, and willingness to work together—government, NGOs, universities, communities, private sector, experts and donors— the Indonesian coastal family could not have grown so much stronger so quickly.



Dr. Anne Patterson
*Director
Office of Natural Resources Management
U.S. Agency for International
Development/ Indonesia*



Maurice Knight
*Chief of Party
Indonesia Coastal Resources
Management Project
Coastal Resources Center
University of Rhode Island*



Dr. Widi A. Pratikto
*Director General for Coasts and
Small Island Affairs
Indonesia Ministry of Marine Affairs
and Fisheries*



Dr. Dedi M.M. Riyadi
*Deputy Minister/Deputy Chairman for
Natural Resources and Environment
Indonesia National Development
Planning Agency*

August 25, 2003

DAFTAR KOLEKSI DOKUMEN PROYEK PESISIR 1997 - 2003 CONTENT OF CRMP COLLECTION 1997 - 2003

Yang tercetak tebal adalah dokumen yang tersedia sesuai bahasanya
Bold print indicates the language of the document

PEMBELAJARAN DARI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA **LEARNING FROM THE WORLD OF COASTAL MANAGEMENT IN INDONESIA**

1. CD-ROM Latar Belakang Informasi dan Produk-produk Andalan Proyek Pesisir
CD-ROM *Background Information and Principle Products of CRMP*
-

SERI REFORMASI HUKUM **COASTAL LEGAL REFORM SERIES**

1. Studi Kasus Penyusunan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir
Case Study Developing a National Law on Coastal Management
2. Studi Kasus Penyusunan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
Case Study Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Developing a District Law in Minahasa on Community-Based
Integrated Coastal Management
3. Studi Kasus Batas Wilayah Laut Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka-
Case Study Belitung
The Marine Boundary Between the Provinces of South Sumatera and
Bangka-Bilitung
4. Studi Kasus Konsultasi Publik dalam Penyusunan RUU
Case Study A Public Consultation Strategy for Developing National Laws
5. Panduan Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut
Guidebook Undang-Undang No.22/1999
Establishing Marine Boundaries under Regional Authority Pursuant to
National Law No. 22/1999
6. Contoh Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Pengelolaan
Example Sumberdaya Wilayah Pesisir
The Process of Developing Coastal Resource Management Laws
7. Contoh Dokumen-dokumen Pendukung dari Peraturan Perundangan
Example Pengelolaan Wilayah Pesisir
Example from Development of Coastal Management Laws
8. CD-ROM Dokumen-dokumen Pilihan dalam Peraturan Perundangan
CD-ROM Pengelolaan Wilayah Pesisir
Selected Documents from the Development of Coastal Management
Laws
9. CD-ROM Pengesahan Perda Minahasa Pengelolaan Sumberdaya Wilayah
CD-ROM Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat
Enactment of a District Law in Minahasa on Community-Based Inte-
grated Coastal Management

SERI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAERAH
REGIONAL COASTAL MANAGEMENT SERIES

1. Panduan Penyusunan Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir
Guidebook Developing A Coastal Resources Atlas
2. Contoh Program Pengelolaan Wilayah Pesisir di Lampung
Example Lampung Coastal Management Program
3. Contoh Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan dan Peta-
Example peta Pilihan
Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan and Volume
of Maps
4. Contoh Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Pilihan
Example Selected Compilation of Coastal Resources Atlases
5. CD-ROM Rencana Strategis Pengelolaan Terpadu Teluk Balikpapan
CD-ROM Balikpapan Bay Integrated Management Strategic Plan
6. Katalog Database SIG dari Atlas Lampung (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Catalogue Lampung Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
7. Katalog Database SIG dari Atlas Minahasa, Manado dan Bitung (Edisi
Catalogue Terbatas, dengan 2 CD)
Minahasa, Manado and Bintung Atlas GIS Database (with 2 CDs)
(Limited Edition, with 2 CDs)
8. Katalog Database SIG dari Atlas Teluk Bintuni (Edisi Terbatas, dengan 2 CD)
Catalogue Bintuni Bay Atlas GIS Database (Limited Edition, with 2 CDs)
9. Katalog Database SIG dari Teluk Balikpapan (Edisi Terbatas, dengan 1CD)
Catalogue Balikpapan Bay GIS Database (Limited Edition, with 1 CDs)

SERI PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR BERBASIS MASYARAKAT
COMMUNITY-BASED COASTAL RESOURCES MANAGEMENT SERIES

1. Studi Kasus Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat di
Case Study Sulawesi Utara
Community Based Coastal Resources Management in North Sulawesi
2. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
Guidebook Community Based Coastal Resources Management
3. Panduan Pembentukan dan Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut Berbasis
Guidebook Masyarakat
Developing and Managing Community-Based Marine Sanctuaries
4. Panduan Pembersihan Bintang Laut Berduri
Guidebook Crown of Thorns Clean-Ups
5. Contoh Dokumen dari Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis
Example Masyarakat di Sulawesi Utara
Documents from Community-Based Coastal Resources Management
in North Sulawesi
6. CD-ROM Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat
CD-ROM Community-Based Coastal Resources Management

SERI PERGURUAN TINGGI KELAUTAN
COASTAL UNIVERSITY SERIES

1. Studi Kasus Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia
 Case Study *Developing the Indonesian Sea Partnership Program*
2. Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)
 Example *Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1996-2003)*
3. Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu
 Example *Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training*
4. Katalog Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)
 Catalogue *Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)*
5. CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
 CD ROM *Coastal University Materials*

SERI PEMANTAUAN WILAYAH PESISIR
COASTAL MONITORING SERIES

1. Studi Kasus Pengembangan Program Pemantauan Wilayah Pesisir oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara
 Case Study *Developing a Stakeholder-Operating Coastal Monitoring Program in North Sulawesi*
2. Panduan Pemantauan Terumbu Karang dalam rangka Pengelolaan
 Guidebook *Coral Reef Monitoring for Management (from Philippine Guidebook)*
3. Panduan Metode Pemantauan Wilayah Pesisir oleh FORPPELA, jilid 1
 Guidebook *FORPPELA Coastal Monitoring Methods, Version 1*
4. Panduan Pemantaun Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Metode Manta Tow
 Guidebook *Community-Based Monitoring of Coral Reefs using the Manta Tow Method*
5. Contoh Program Pemantauan oleh Para Pemangku Kepentingan di Sulawesi Utara Tahun Pertrama, Hasil-hasil FORPPELA 2002 (dengan 1 CD)
 Example *Year One of North Sulawesi's Stakeholder-Operated Monitoring Program, FORPPELA 2002 Results (with 1 CD-ROM)*

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
For more information:

Coastal Resource Center
University of Rhode island
Narragansett, Rhode Island 02882, USA
Phone: 1 401 879 7224
Website: <http://www.crc.uri.edu>

CRMP
Ratu Plaza Building, lt 18
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 9
Jakarta 10270, Indonesia
Phone: (021) 720 9596
Website: <http://www.pesisir.or.id>

Contoh
Pencapaian oleh
Proyek Pesisir PKSPL-IPB
dan INCUNE 1997-2003

Dietrich G. Bengen

Contoh
Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB
dan INCUNE 1997-2003

Dietrieck G. Bengen

Kutipan : Bengen, D.G., 2003; Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE 1997-2003; *dalam* Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997-2003, Seri Perguruan Tinggi Kelautan, M.Knight, S. Tighe (editor); Coastal Resources Center, University of Rhode Island, Narragansett, Rhode Island, USA.

Dicetak di Jakarta, Indonesia 2003

Dana untuk persiapan dan pencetakan dokumen ini disediakan oleh USAID bagian dari USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam (NRM) USAID/CRC-URI Proyek Pesisir Jakarta.

Keterangan rinci tentang publikasi Proyek Pesisir bisa diperoleh melalui www.pesisir.or.id
Keterangan rinci tentang publikasi NRM bisa diperoleh melalui www.nrm.or.id
Keterangan rinci tentang publikasi CRC bisa diperoleh melalui www.crc.uri.edu

Editor Bahasa: Kun S. Hidayat, Ahmad Husein
Foto Cover : Tantyo Bangun
Tata Letak : Patus Legowo, Yayak M. Saat

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
1 Pendahuluan	1
2 Hasil-hasil Utama Implementasi Proyek Pesisir PKSPL-IPB	3
- Publikasi	3
- Perpustakaan	4
- Pendidikan dan Pelatihan (Magang & Training)	4
- Pengembangan Pembelajaran	5
- Pengembangan Kerjasama Antar Universitas (INCUNE = Indonesian Coastal Universities Network)	6
- Pengembangan Program Magang	7
Lampiran	
Contoh Buku Panduan Program Magang	9

Pengantar

Pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan warga negara di mana saja, memandang perguruan tinggi sebagai sumber untuk panduan intelektual dan keahlian, terutama dalam arti sebagai sumber orang-orang yang terlatih. Ada alasan-alasan lain yang menjadikan perguruan tinggi sebagai sumber, untuk lebih dari sekadar pelatihan. Saat munculnya sebuah paradigma baru, seperti pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu, perguruan tinggi adalah pihak yang pertama memiliki informasi untuk mengajarkan, menerapkan konsep baru ini ke dalam konteks lokal serta mencoba untuk memastikan keterkaitannya dengan berbagai macam (kondisi) setempat. Hal ini tentunya membutuhkan sejumlah upaya dan waktu untuk menghasilkan sebuah kesadaran massa, pembelajaran dan pemahaman untuk membangun, sebelum terjadi suatu perubahan dalam kebijakan dan perilaku.

Bahkan pada saat tidak ada kemajuan dalam pengetahuan secara teknis, perguruan tinggi dapat memainkan peran yang besar dalam membantu sebuah negara untuk beradaptasi terhadap situasi politik yang baru. Perguruan tinggi dapat menyumbangkan dua hal, peran sebagai pemikir analitis dan kritis dalam mengembangkan pilihan-pilihan dan memahami implikasi-implikasi dari situasi yang baru dan peran dalam mengarahkan dan membangun kapasitas para pemangku kepentingan dalam jangkauan yang luas (misalnya tidak hanya di kalangan mahasiswa perguruan tinggi) dalam mengadaptasi situasi yang baru.

Untuk alasan-alasan tersebut, University of Rhode Island dan Coastal Resources Center menjalin kemitraan dengan perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dari program yang sudah berjalan, melihat perguruan tinggi sebagai komponen penting bagi keberhasilan untuk melakukan dan melestarikan perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia.

Sejalan dengan misi Proyek Pesisir/CRMP (Coastal Resources Management Project) dalam mendukung Pemerintah Indonesia mengimplementasikan desentralisasi dan penguatan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, kemitraan antara Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB menjadi sebuah program penting yang secara nyata telah memberikan sumbangan terhadap pencapaian misi Proyek Pesisir baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal, khususnya di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan.

Di tingkat nasional, program Proyek Pesisir-PKSPL membantu Pemerintah Indonesia dalam menyebarluaskan konsep-konsep dan praktik-praktik pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu dengan menggunakan berbagai cara, termasuk juga menyajikan tinjauan dan analisis terhadap aplikasi konsep-konsep baru tersebut untuk konteks Indonesia. Salah satu upaya yang lebih nyata adalah terselenggaranya Konferensi Nasional Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Indonesia yang berlangsung dua tahun sekali (bi-annual). Konferensi pertama diselenggarakan oleh Proyek Pesisir-PKSPL di Bogor pada tahun 1998. Konferensi Nasional kedua berlangsung pada tahun 2000 diselenggarakan dengan kerjasama antara berbagai pihak pemangku kepentingan di Makassar, Sulawesi

Selatan. Yang terakhir adalah Konperensi Nasional III di Bali pada tahun 2002, dilaksanakan oleh institusi setempat dengan bimbingan para mitra Proyek Pesisir-PKSPL.

Penyelenggaraan tiga konperensi tersebut telah menghasilkan dukungan dan partisipasi yang luas (Konperensi Nasional III dihadiri oleh lebih dari 600 peserta) dari para pemangku kepentingan, membuktikan adanya minat dan antusiasme yang luar biasa terhadap pengelolaan pesisir dari masyarakat Indonesia, dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya masalah tersebut. Konperensi Nasional berikutnya akan diselenggarakan pada tahun 2004 di Kalimantan Timur dan sepenuhnya dilakukan dengan dana dari para pemangku kepentingan setempat. Konperensi Nasional dwi-tahunan ini telah menjadi ajang yang sangat bagus untuk saling bertukar pengalaman, menyaksikan hasil-hasil riset, dan berbagai perkembangan terkini berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Selain Konperensi Nasional, Proyek Pesisir PKSPL-IPB juga melaksanakan sejumlah lokakarya dan program-program pelatihan Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Wilayah Pesisir di berbagai tempat di tanah air untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pemangku kepentingan, dan untuk menyebarkan dan berbagi informasi tentang penerapan pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia. Salah satu lokakarya yang dilakukan adalah learning workshop tentang kemajuan dari program Proyek Pesisir. Proyek Pesisir-PKSPL membentuk suatu tim pembelajaran atau dikenal dengan "learning team" di lokasi Pusat Kajian. Tim ini melakukan tinjauan secara kritis dan menghasilkan masukan-masukan balik bagi pelaksanaan program-program di lapangan di Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Nasional.

Learning Team juga menghasilkan sejumlah produk, setiap tahun kontribusinya makin nyata terlihat dari staf di lapangan sejalan dengan meningkatnya kapasitas mereka. Tim ini juga menghasilkan laporan tahunan dan laporan-laporan pelatihan, tinjauan dan presentasi penemuan-penemuan serta kemajuan dalam program Proyek Pesisir. Setiap tahun, tema yang diangkat terfokus pada tahapan-tahapan dalam siklus dasar kebijakan, terdiri atas Membangun Kesadartahuan (Awareness Building), Menyusun Rencana Pengelolaan (Creating Management Plan), Adopsi Perencanaan dan Kebijakan (Adopting Plans and Policies), Rencana Implementasi dan Pemantauan dan Evaluasi (Monitoring & Evaluating) terhadap rencana-rencana untuk adaptasi.

Sukses lain yang diraih oleh program Proyek Pesisir PKSPL-IPB adalah penerbitan Jurnal Pesisir dan Lautan yang terbit setahun tiga kali dan kalawarta Warta Pesisir dan Lautan, yang disebarluaskan ke lebih dari 1000 pembaca dan kebutuhannya semakin meningkat. Publikasi jurnal dan warta saat ini terus berlanjut tanpa dukungan dana dari proyek, dilaksanakan oleh PKSPL dan Institut Pertanian Bogor. Selain itu, Proyek Pesisir dan PKSPL-IPB telah mengembangkan satu perpustakaan nasional pesisir dan lautan di Bogor, yang menjadi suatu tempat yang tepat untuk pencarian segala macam informasi tentang pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam rangka upaya penguatan kelembagaan untuk pengelolaan wilayah pesisir, Proyek Pesisir-PKSPL IPB mengembangkan kemitraan melalui jaringan kerjasama antar perguruan tinggi kelautan terfokus pada isu-isu pesisir dan lautan, disebut Indonesia Coastal University Network (INCUNE). INCUNE berdiri pada tahun 1999 dan saat ini memiliki anggota 11 perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi memiliki jaringan sendiri yang lebih kecil yang menyangkut tentang pesisir dan lautan. Dengan terbentuknya jaringan ini, terjadi pertukaran informasi antar perguruan tinggi kelautan, dan selanjutnya akan tersebar ke para pemangku kepentingan setempat.

Pada program tahun lalu, sejumlah anggota INCUNE membagikan pengalaman-pengalaman mereka melalui acara ICM Training Program atau Program Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu yang diselenggarakan oleh PKSPL untuk para pemangku kepentingan daerah, mengadaptasi kurikulum untuk memasukkan muatan dan konteks lokal (Baca juga: Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu) sebagai mekanisme lain untuk membangun kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlihat adanya minat yang besar untuk memperluas jaringan ini dengan memasukkan lebih banyak lagi perguruan-perguruan tinggi lain dan memasukkan lebih banyak lagi program-program dan kerjasama pengabdian masyarakat, semua itu masih terus didiskusikan.

Pengalaman di lapangan dikembangkan oleh PKSPL-IPB dengan memberikan bimbingan untuk program lapangan di Lampung yang dilaksanakan bersama dengan masyarakat dan pemerintah Provinsi Lampung untuk menyusun program-program pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir tingkat provinsi dan tingkat desa. Keluaran utama dari program Lampung PKSPL-IPB adalah Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung dan Rencana Strategis Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir tingkat provinsi, keduanya disusun melalui suatu proses partisipatif luas.

Untuk implementasi kegiatan awal (early actions) dari rencana strategis, PKSPL-IPB menjalin kerjasama dengan masyarakat setempat di dua wilayah, yaitu membuat program daerah perlindungan laut di Pulau Sebesi dan program pengelolaan mangrove ramah lingkungan di Desa Pematang Pasir. Kedua program ini dan program lain di Lampung, saat ini didukung dan dibimbing langsung oleh PKSPL-IPB dan pemerintah setempat, tanpa dukungan maupun bimbingan dari Proyek Pesisir lagi.

Dalam dua tahun terakhir, Proyek Pesisir memberikan dukungan nyata kepada Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan suatu program kemitraan yang bersifat desentralisasi dengan perguruan-perguruan tinggi kelautan daerah dengan maksud mendapatkan kesadartahuan, pendidikan dan pelatihan, kebijakan dan riset terapan yang mendukung kebutuhan para pemangku kepentingan setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka mengangkat isu-isu lokal yang sesuai dengan prioritas di tingkat nasional.

Upaya ini disebut Program Kemitraan Bahari Indonesia (Indonesian Sea Partnership Program) disusun dengan mengacu pada model Sea Grant College Program di Amerika Serikat, tetapi telah diadaptasi dan disesuaikan dengan konteks di Indonesia dan baru memasuki tahun pertama implementasi. Program ini menggunakan pendekatan dinamis dalam rangka memperoleh masukan operasional pragmatis yang maksimal dari para pelaku, dan dari wilayah-wilayah yang ikut bertanggungjawab atas pendanaan yang diperlukan untuk Kemitraan Bahari.

Melalui bermacam-macam mekanisme tersebut, Proyek Pesisir dan para mitra perguruan tingginya telah memberikan sumbangan nyata untuk memperkuat kapasitas pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Indonesia di tingkat lokal maupun nasional. Mengembangkan dan menerapkan kemampuan berpikir kritis dalam suatu pendekatan pembelajaran, membangun kapasitas para pemangku kepentingan di tingkat lokal (termasuk untuk menciptakan lulusan universitas yang terdidik) dan memberi bimbingan atau saran bagi program-program pesisir lokal, semuanya menjadi aturan-aturan standar bagi perguruan tinggi kelautan di Indonesia. Melalui Kemitraan Bahari, INCUNE, KONAS dan program-program lain, aktivitas-aktivitas ini diharapkan terus berkembang dan berlanjut tanpa batas untuk memberi manfaat bagi implementasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir di Indonesia yang berkelanjutan.

Seri Perguruan Tinggi ini terdiri atas:

- 1 Studi Kasus Pengembangan Program Kemitraan Bahari di Indonesia
Case Study Developing the Indonesian Sea Partnership Program
- 2 Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003)
Example Proyek Pesisir's Achievements in Bogor Agricultural Institute's Center for Coastal and Marine Resources Studies and the Indonesian Coastal University Network (1997-2003)
- 3 Contoh Kurikulum dan Agenda Pelatihan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Terpadu
Example Curriculum and Agenda from Integrated Coastal Resources Management Training
- 4 Katalog Abstrak "Jurnal Pesisir dan Lautan" (1998-2003)
Catalogue Abstracts from "Pesisir dan Lautan Journal" (1998-2003)
- 5 CD-ROM Dokumen Perguruan Tinggi Kelautan
CD-ROM Coastal University Materials

•••

Buku Contoh Pencapaian oleh Proyek Pesisir PKSPL-IPB dan INCUNE (1996-2003) ini berisikan kumpulan hasil-hasil utama implementasi Proyek Pesisir PKSPL-IPB sepanjang 1996-2003. Hasil-hasil tersebut dikelompokkan dalam 7 (tujuh) bidang, yaitu publikasi, perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pembelajaran, pengembangan kerja sama antar universitas (INCUNE), pengembangan program magang, peran serta dalam kebijakan nasional, serta pengembangan konperensi nasional.

Secara keseluruhan, Proyek Pesisir PKSPL-IPB memperoleh pencapaian yang amat berarti dalam seluruh bidang tersebut. Dalam bidang publikasi, Proyek Pesisir PKSPL-IPB menghasilkan tiga jenis publikasi rutin dan 19 judul publikasi tidak rutin. Ketiga publikasi rutin tersebut adalah Jurnal Pesisir dan Lautan, Warta Pesisir, dan Warta INCUNE, yang masing-masing dicetak sebanyak 1000 eksemplar. Upaya menanggulangi keterbatasan sumber informasi dalam bidang pengelolaan pesisir di Indonesia dilakukan dengan mendirikan Perpustakaan PKSPL-IPB pada tahun 1997. Ini merupakan perpustakaan pertama di Indonesia yang memiliki katalog data base untuk 2.996 judul buku.

Proyek Pesisir PKSPL-IPB melaksanakan program magang (intern) dengan total jumlah 40 mahasiswa dan peneliti dari berbagai universitas, lembaga-lembaga pemerintah, dan LSM. Kegiatan tersebut difokuskan di tiga lokasi lapang Proyek Pesisir (Sulawesi Utara, Lampung, dan Kalimantan Timur). Program ini kemudian dikembangkan lebih luas, setelah terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap keterlibatan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program-program Proyek Pesisir.

Pelatihan mengenai pengelolaan pesisir terpadu telah diselenggarakan di Bogor dan berbagai kota lainnya. Setiap tahunnya, Setiap tahunnya, diadakan juga lokakarya penyebarluasan hasil-hasil pembelajaran dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan Proyek Pesisir kepada seluruh mitra di berbagai daerah. Buku ini menjelaskan pula kehadiran Jaringan Kerja Universitas Pesisir Indonesia Indonesia (INCUNE—Indonesia Coastal Universities Network). Hingga kini, anggota INCUNE berjumlah 11 universitas dari berbagai daerah di Indonesia.

Proyek Pesisir PKSPL-IPB terlibat aktif dalam penyusunan rancangan kebijakan menyangkut pengelolaan wilayah pesisir, seperti draft Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Proyek Pesisir PKSPL-IPB juga senantiasa memantau Departemen Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan kebijakan dan persiapan panduan untuk pengelolaan pulau-pulau kecil.

Dan yang tak kalah pentingnya, sejak tahun 1998, Proyek Pesisir PKSPL-IPB senantiasa aktif dalam kegiatan Konferensi Nasional (KONAS) Pengelolaan Pesisir Terpadu, yakni sejak dilaksanakan pertama kali di Bogor (1998), Makassar (2000), dan di Bali (2003).

Berbagai pencapaian tersebut tentulah belum sempurna dan masih memerlukan peningkatan di masa depan. Namun demikian, gambaran ringkas tentang contoh pencapaian, berikut contoh dokumen yang disediakan (Panduan Program Magang), diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga sekaligus berguna sebagai informasi bagi lembaga dan institusi sejenis, khususnya di perguruan tinggi, yang tertarik atau tengah berupaya mengembangkan konsep pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Brian Crawford dari Coastal Resources Center University of Rhode Island (CRC/URI), atas kerja sama yang erat yang telah dijalin antara lembaga tersebut dan Proyek Pesisir PKSPL-IPB, juga kepada Maurice Knight (Chief of Party Proyek Pesisir), Stacey Tighe (Senior Technical Assistant Proyek Pesisir), dan semua pihak yang selama ini membantu kelancaran kegiatan Proyek Pesisir PKSPL-IPB.

Jakarta, Agustus 2003

Koordinator Program Proyek Pesisir-PKSPL IPB
Prof.Dr.Ir. Dietriech G. Bengen, DEA

Pendahuluan

Sejak tahun 1996 hingga sekarang, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) secara aktif terlibat dalam desain dan implementasi kegiatan Proyek Pesisir (*Coastal Resource Management Project/CRMP*). Kelak diharapkan melalui keterlibatan aktif dan fasilitasi dari Proyek Pesisir, PKSPL IPB akan menjadi institusi utama dalam pengembangan kapasitas pengelolaan sumberdaya pesisir (*Coastal Resources Management*) di Indonesia. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2002, melalui tim pembelajaran, Proyek Pesisir (PP) PKSPL-IPB secara rutin mendokumentasikan pengalaman-pengalaman dan pelajaran-pelajaran yang diperoleh mulai dari tahap perencanaan hingga proses implementasi di lapangan. Tim tersebut juga terlibat dalam memfasilitasi Proyek Pesisir Lampung dan mendukung program *outreach* dan pengembangan kebijakan nasional dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.

Melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder* baik di tingkat Nasional maupun Daerah, khususnya dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, aktivitas PP PKSPL IPB menjadi lebih terintegrasi ke dalam agenda kebijakan nasional Pengelolaan sumberdaya pesisir. Integrasi ini terus berlanjut dan semakin memperluas profil PKSPL-IPB sebagai lembaga nasional terpenting (*key*) terutama dalam pengembangan program pengelolaan sumberdaya pesisir. Aspek penting lain dari kegiatan PP PKSPL-IPB adalah mengembangkan kapasitas dari universitas seluruh Indonesia melalui Jaringan Universitas Kelautan Indonesia (INCUNE, *Indonesia Coastal Universities Network*), dan juga mempertahankan “the lead CRMP partner” untuk beberapa aktivitas berskala nasional yg berkaitan dengan pembelajaran dan *outreach*.

Dalam kerangka kerja Proyek Pesisir, PP PKSPL IPB merupakan institusi di tingkat nasional yang menjadi penghubung mata rantai lokal dan nasional dari Proyek Pesisir. Ada dua sasaran khusus yang ingin dicapai yang terkait dengan kemitraan PP PKSPL IPB, yaitu:

- a. Secara nasional PP PKSPL-IPB dapat menjadi mitra (*partner*) utama pembelajaran Proyek Pesisir dan diakui secara nasional sebagai pusat informasi, tenaga ahli dan pusat penyebarluasan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya pesisir berkelanjutan;
- b. PP PKSPL-IPB bersama mitra-mitra lainnya akan terus membangun dan melaksanakan praktek-praktek terbaik dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, baik pada pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta aktivitas nyata di tingkat desa.

Melalui 2 (dua) sasaran tersebut, PP PKSPL-IPB bertujuan menjamin keberlanjutan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh CRMP dan melembagakan upaya-paya tersebut. Diharapkan, setelah berakhirnya CRMP pada Bulan April 2003 PP PKSPL IPB memiliki

kemampuan sebagai pusat universitas (University-based centre) dan kapasitas teknis yg luas (khususnya melalui INCUNE) untuk mendukung sejumlah langkah inisiatif di bidang Coastal Management yang meliputi :

- Dukungan aktif INCUNE dalam program CRM skala regional di berbagai lokasi
- Memberikan kontribusi terhadap rancangan dan “institutional memory” dari berbagai kegiatan pengelolaan pesisir baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah di berbagai daerah
- Pusat dokumentasi dan pembelajaran tingkat nasional yang menyediakan media pertukaran dan pembelajaran di antara berbagai kegiatan pengelolaan pesisir yang dilakukan di Indonesia
- Perpustakaan pengelolaan pesisir nasional yang profesional dan mudah diakses (untuk semua stakeholder).
- Publikasi yg ditujukan untuk stakeholder utama seperti para pakar (tenaga ahli) dan pemerhati di bidang pengelolaan pesisir serta dan pembuat kebijakan.
- Menentukan dan mendukung secara berkesinmabungan jaringan INCUNE di Indonesia sesuai dengan kapasitasnya.

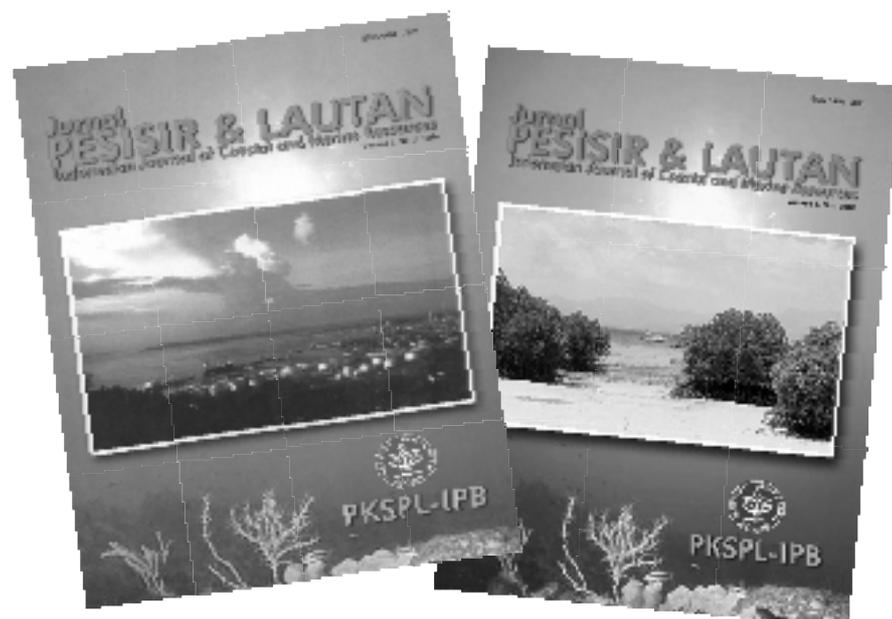
Hasil-hasil Utama Implementasi Proyek Pesisir PKSPL-IPB

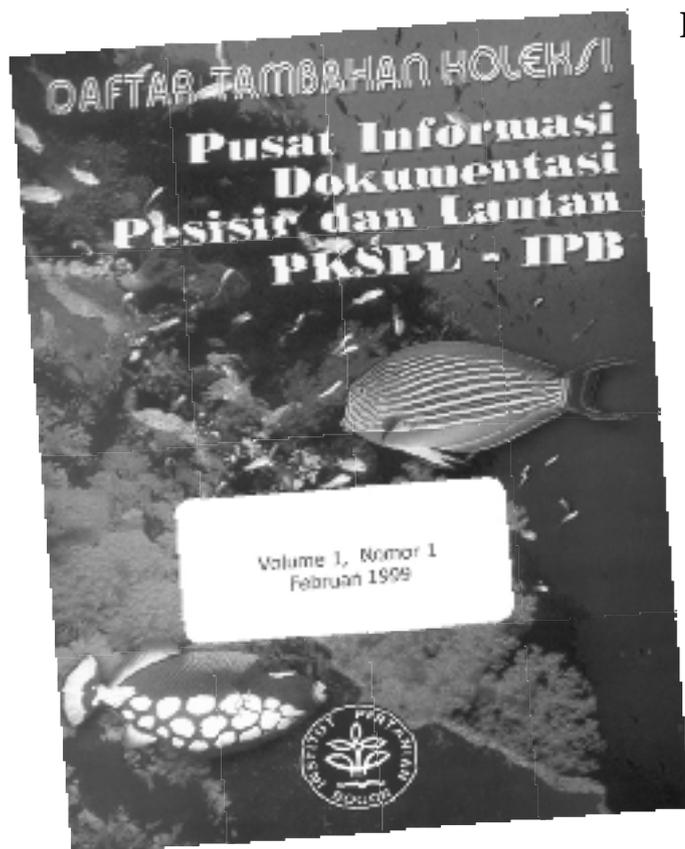
Publikasi

Sampai saat ini, PP PKSPL IPB telah menghasilkan memiliki 3 jenis publikasi rutin dan 19 judul publikasi tidak rutin. Ketiga jenis publikasi rutin tersebut adalah (a) Jurnal Pesisir dan Lautan, (b) Warta Pesisir dan (c) Warta INCUNE. Jurnal Pesisir dan Lautan diterbitkan pertama kali pada 1998, dan terbit 2 kali setahun. Jumlah eksemplar untuk setiap kali penerbitan adalah sebanyak 1000 eksemplar yang didistribusikan ke berbagai institusi seperti universitas (dalam dan luar negeri), lembaga pemerintahan, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya. Jurnal Pesisir dan Lautan sudah mendapatkan akreditasi dari Departemen Pendidikan Nasional No. 22/DIKTI/KEP/2002 pada tanggal 8 Mei 2002.

Warta Pesisir diterbitkan pertama kali pada tahun 1999, dengan frekuensi penerbitan 4-6 kali setahun. Seperti halnya dengan jurnal, Warta Pesisir juga diterbitkan sebanyak 1000 eksemplar setiap kali terbit, dan didistribusikan kepada setiap universitas, lembaga pemerintahan, LSM dan pihak-pihak terkait lainnya. Sementara untuk Warta INCUNE, pertama kali diterbitkan pada tahun 2001, dengan frekuensi penerbitan 2 kali setahun dengan jumlah 500 eksemplar.

Selain publikasi rutin di atas, PP PKSPL IPB juga menerbitkan publikasi tidak rutin. Pada tahun 2002, terdapat 19 judul publikasi tidak rutin yang diterbitkan dan didistribusikan kepada beberapa institusi dan lembaga terkait.



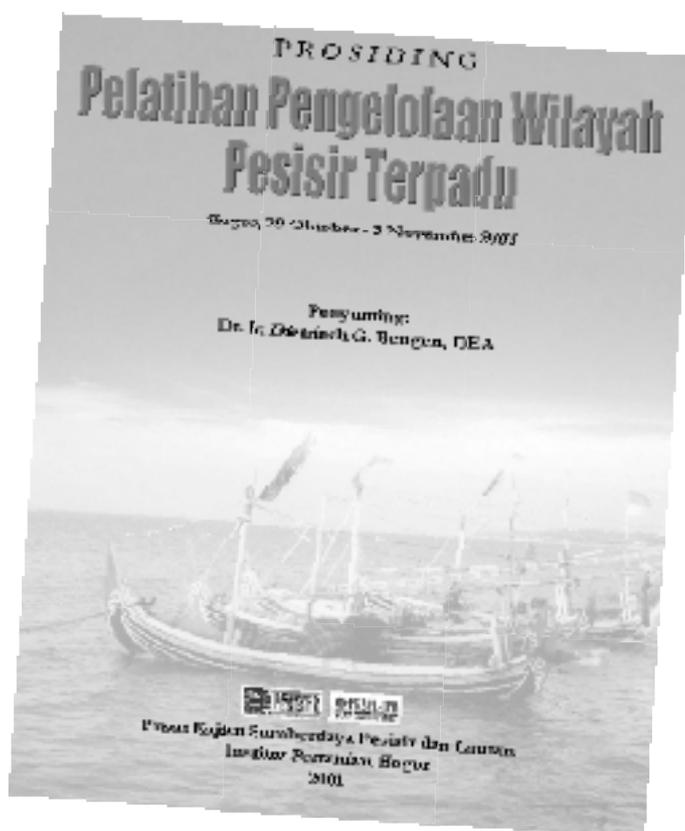


Perpustakaan

Salah satu permasalahan yang sulit dalam meningkatkan pengelolaan pesisir di Indonesia adalah adanya keterbatasan sumber informasi seperti buku dan referensi teknis. Perpustakaan PKSPL IPB dikembangkan sejak 1997 dengan dukungan Proyek Pesisir. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan pertama yang memiliki berbagai informasi dan database pengelolaan pesisir di Indonesia. Perpustakaan memiliki katalog database untuk 2.996 judul buku. Perpustakaan ini diperuntukkan tidak hanya melayani IPB saja, tetapi juga dari kalangan di luar IPB. Setiap tahun terdapat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.

Pendidikan dan Pelatihan (Magang & Training)

PP PKSPL IPB mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk mendukung program lapangan dengan basis keilmuan, serta meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan pesisir terpadu. Pengembangan kapasitas ini dilakukan melalui program pelatihan dan magang. Program magang (*intern*) dimulai sejak tahun 1999 dengan peserta yang sangat bervariasi. Peserta magang ini berasal dari berbagai institusi seperti lembaga pemerintah yang terkait, organisasi non pemerintah, dan perguruan tinggi di Indonesia dan luar negeri. Kegiatan magang difokuskan di 3 lokasi lapang (*Filed Sites*) Proyek

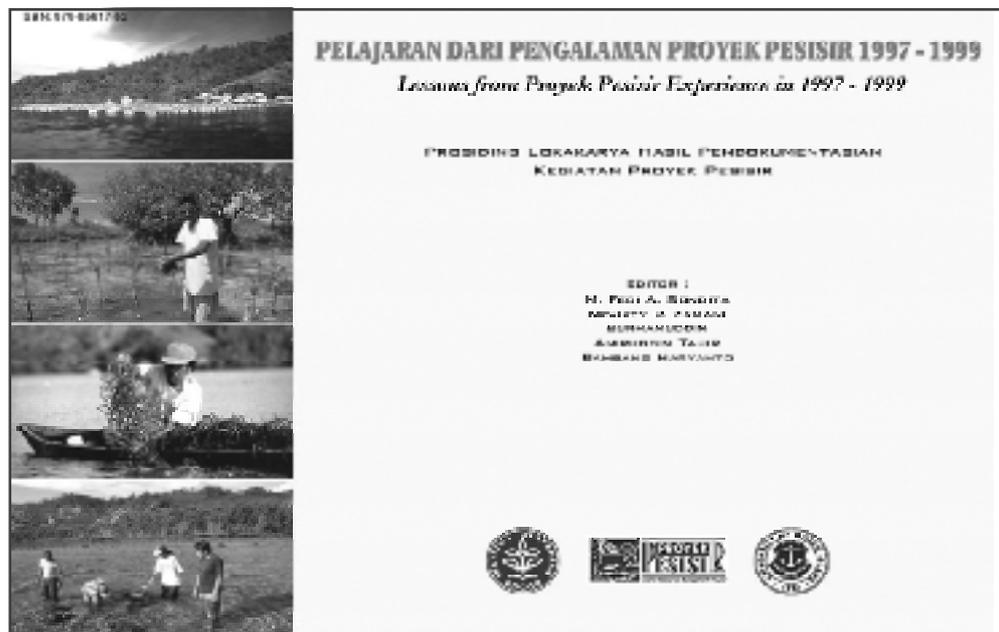


Pesisir, yaitu Sulawesi Utara, Lampung dan Balikpapan-Kalimantan Timur. Jumlah peserta magang selama 3 tahun (1999-2002) adalah sebanyak 40 mahasiswa dan peneliti.

PP PKSPL IPB juga melaksanakan beberapa pelatihan pengelolaan pesisir terpadu sejak 1999, dengan peserta berasal dari berbagai daerah dan institusi. Pelatihan ini dilanjutkan dengan Training of Trainers (ToT) pada tahun 2000 dan 2001, khususnya untuk anggota INCUNE di dalam meningkatkan kapasitas pengelolaan pesisir terpadu di institusinya. Setelah terlibat dalam pelatihan di IPB, program pelatihan yang serupa dilaksanakan di berbagai anggota INCUNE (UNDIP, UNILA, UNHAS, UNSRAT dan UNCEN) di daerah mereka masing-masing dengan difasilitasi oleh PP PKSPL IPB.

Pengembangan Pembelajaran

Pembelajaran sebagai suatu proses merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan mulai kegiatan pendokumentasian berbagai kegiatan atau program pengelolaan pesisir yang dikembangkan oleh Proyek Pesisir baik pada tataran nasional maupun lokal (*field sites*). Dari hasil-hasil pendokumentasian tersebut, Proyek Pesisir memetik pengalaman-pengalaman berharga untuk dapat dijadikan pelajaran-pelajaran bagi pengembangan pengelolaan pesisir secara terpadu. Pelajaran-pelajaran yang berharga ini dapat berupa kegagalan-kegagalan yang dialami oleh Proyek Pesisir ataupun keberhasilan-keberhasilan



yang dicapai. Pelajaran yang diambil dari kegagalan adalah pada dasarnya bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kegagalan tersebut, agar tidak terulang lagi pada masa yang akan datang. Sementara itu, pelajaran yang dapat diambil dari sebuah keberhasilan adalah bagaimana menjalankan strategi untuk mencapai keberhasilan tersebut.

Pelajaran-pelajaran tersebut di atas, selanjutnya disebarluaskan kepada segenap komponen stakeholder baik melalui lokakarya, seminar, maupun pendistribusian prosiding hasil-hasil pendokumentasian Proyek Pesisir. Selama 4 tahun implementasinya, Proyek pesisir sudah

banyak menyebarkan pengalaman-pengalaman ke berbagai komponen stakeholder dan pemerintah. Beberapa kegiatan yang banyak diadopsi oleh daerah-daerah lain adalah (1) Penyusunan Atlas Sumberdaya Pesisir Lampung oleh Proyek Pesisir Lampung bekerja sama masyarakat dan pemerintah Lampung, telah diadopsi oleh 5 Propinsi lain, yaitu Jawa Barat, Bali, Sulawesi Tenggara, Riau, dan Nusa Tenggara Barat, (2) Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Pesisir Lampung, dan (3) Pengembangan model Daerah Perlindungan Laut berbasis masyarakat di desa Blongko oleh Proyek Pesisir Sulawesi Utara.

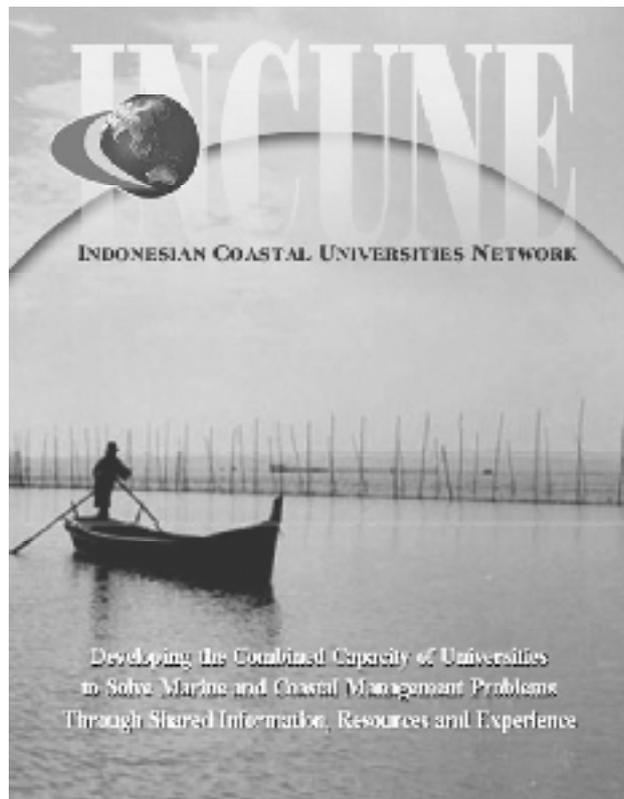
Secara konsep, komitmen untuk melakukan pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas, dapat dianggap sebagai langkah yang sangat mudah, namun pada saat membahas maksud pembelajaran dan bagaimana cara melakukannya, banyak sekali masalah yang tidak terpecahkan yang ditemui. Learning team menghabiskan sebagian besar waktu dalam tahun kedua untuk membahas masalah-masalah tersebut, membaca dan membaca ulang literatur, membahas dan berdiskusi tentang tujuan pembelajaran. Dengan bantuan technical advisor, maka pada 6 bulan berikutnya, learning team bekerjasama dengan staf lainnya baru mampu memformulasikan tujuan dan metode pembelajaran tersebut.

Pengembangan Kerjasama Antar Universitas (INCUNE = Indonesian Coastal Universities Network)

INCUNE hadir sebagai jaringan berbasis tenaga ahli lokal yang akan diperkuat melalui keterlibatan didalam proses konsultatif dan keterkaitan (engagement) secara berkelanjutan. Ini akan memberikan keuntungan terhadap universitas-universitas tersebut dalam hal pembangunan demokrasi dan peran-serta pengambilan keputusan dalam CRM. Dengan dukungan CRMP dan pengawasan oleh PP PKSPL IPB, kegiatan ini akan melibatkan kerjasama riset kebijakan dalam CRM.

INCUNE adalah implementasi dari 11 Universitas, yaitu :

1. Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat
2. Universitas Riau, (UNRI), Riau
3. Universitas Bung Hatta (UBH), Padang, West Sumatera
4. Universitas Lampung (UNILA), Bandar Lampung, Lampung
5. Universitas Indonesia (UI), Jakarta
6. Universitas Diponegoro UNDIP), Semarang, Jawa Tengah
7. Universitas Mulawarman (UNMUL), Samarinda, Kalimantan Timur



- 8. Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan
- 9. Universitas Sam Ratulangi (UNSTRAT), Manado, Sulawesi Utara
- 10. Universitas Pattimura (UNPATTI), Ambon, Maluku
- 11. Universitas Cendrawasih (UNCEN), Manokwari, Papua

Pengembangan Program Magang

Program Magang Proyek Pesisir Tahun merupakan salah satu program yang memberikan kontribusi nyata terhadap keterlibatan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam rogram-program Proyek Pesisir Seperti Program Magang sebelumnya, Program Magang tersebut diperuntukkan bagi sarjana dari berbagai disiplin ilmu dan mahasiswa S1 dan S2 tingkat akhir.

Jika dilihat dari komposisi institusi, peminat magang berasal dari berbagai institusi di seluruh Indonesia, sepeti Perguruan Tinggi, Lembaga Pemerintah (Dinas Kelautan dan Perikanan; dan Departemen Kehutanan), dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Beberapa lembaga tersebut adalah: (a) Universitas Hasanuddin Makassar dari jurusan Perikanan, Kelautan dan Sosial Politik; (b) Universitas Riau Pekanbaru dari jurusan Perikanan dan Kelautan; (c) Universitas Diponegoro Semarang; (d) Institut pertanian Bogor dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, serta Program Pasca Sarjana dari Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Pengelolaan Sumberdaya Alam, Ilmu Kelautan dan Ilmu Teknologi Kelautan; (e) Universitas Mulawarman, Samarinda; (f) Universitas Lampung, Bandar Lampung; (g) Universitas Negeri Papua; (h) Balai Taman Laut Nasional Teluk Cendrawasih; (i) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur; (j) Lembaga Maritim Nusantara, Makasar dan (k) Yayasan Lembaga Pengkajian Hukum Masyarakat Ambon.

program magang

Proyek Pesisir atau Coastal Resource Management Project (CRMP) merupakan bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam atau Natural Resource Management (NRM) yang dibiayai oleh USAID - BAPFENAC. NRM adalah salah satu program pembangunan kawasan dimana memantapkan lahan di Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Timur. Dengan bergabung di Proyek Pesisir, berarti Anda telah mendapatkan kesempatan yang berharga bagi magang, serta dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Anda pun akan mendapatkan pengalaman magang serta ilmu untuk bagi profesional Anda.

Siswa yang bergabung ?

- Mahasiswa atau sarjana tingkat akhir
- Mahasiswa S1 dan S2
- Mahasiswa S1 dan S2

Apa saja yang dilakukan ?

Praktikum magang meliputi: 1. Pengumpulan data, 2. Analisis data, 3. Penyusunan laporan, 4. Penyusunan proposal, 5. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan ini, magang akan dibekali dengan alat dan bahan yang diperlukan. Magang akan dibekali dengan alat dan bahan yang diperlukan. Magang akan dibekali dengan alat dan bahan yang diperlukan.

Bagaimana Penerimaan Program Magang ?

- Saran dan usulan diterima oleh dosen pembimbing
- Tesis atau karya ilmiah yang telah selesai
- Metode CV dan surat rekomendasi
- Tesis atau karya ilmiah yang telah selesai

Proposal ditunggu selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2002
Semua proposal yang masuk akan dinilai oleh tim evaluasi

PKSP-IPB INCUNE

Peran Serta dalam Kebijakan Nasional

PP PKSPL IPB terlibat aktif dalam penyusunan seperti draft “Naskah Akademik” dan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Pesisir, serta pengelolaan pesisir dan laut di level Nasional. PP PKSPL IPB juga mengawasi Departemen Kelautan dan Perikanan RI dalam penyusunan kebijakan dan persiapan panduan untuk manajemen pulau pulau kecil.

Pengembangan Konferensi Nasional

Di tingkat nasional PP PKSPL IPB selalu aktif dalam berbagai Konferensi Nasional (KONAS) tentang pengelolaan pesisir, khususnya sejak tahun 1998. Konferensi Nasional I dilaksanakan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1998. KONAS II dilaksanakan di Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2000, dan KONAS III dilaksanakan di Bali pada tahun 2002.

Selain menyelenggarakan workshop, staff PP PKSPL IPB juga aktif untuk berpartisipasi dalam seminar dan workshop skala Nasional dan Internasional (seperti PACON, ICRS, dll). Peran serta dalam kegiatan outreach

PP PKSPL IPB terlibat dalam kegiatan outreach sebagai fasilitator dan sumber informasi. PP PKSPL IPB terutama tim pembelajaran (Learning Team) terlibat langsung dalam beberapa kegiatan diskusi outreach dan kegiatan outreach lainnya (seperti Workshop OUTREACH).



Lampiran

CONTOH BUKU PANDUAN PROGRAM MAGANG

1. PENDAHULUAN

Buku saku ini berisi tentang informasi peraturan dan kondisi bagi para peserta program magang *Proyek Pesisir*, yang memberikan jawaban atas pertanyaan umum yang biasa ditanyakan oleh mereka, serta memberikan gambaran beberapa bantuan pelayanan yang disediakan oleh *Proyek Pesisir*. Di dalamnya juga ditambahkan pengantar tentang tujuan, aktivitas dan strukturnya.

Buku pedoman ini dibagi dalam 7 bagian, termasuk Pendahuluan. Bagian 2 tentang sekilas perkenalan *Proyek Pesisir*, tujuannya, aktivitas dan rencana masa depan, juga diperkenalkan *Coastal Resources Center* - Pusat Sumberdaya Pesisir, sebagai badan pelaksana. Bagian 3 meringkas aturan dan kondisi bagi para peserta program magang *Proyek Pesisir*. Bagian 4-7 mencakup waktu anda sebagai peserta program magang secara kronologis. Bagian 4 menjelaskan periode dari melamar sampai lulus dari proses penyeleksian dan penempatan pada salah satu lokasi kantor.

Bagian 5 membahas mengenai penggunaan waktu peserta program magang, merinci tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak, Anda dan *Proyek Pesisir*. Bagian 6 mengenai informasi penting setelah menyelesaikan magang secara resmi, dan bagian 7 merinci kemungkinan-kemungkinan untuk melanjutkan keterlibatan kembali di *Proyek Pesisir*.

Dengan membaca buku saku ini secara cermat, diharapkan bisa memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan yang timbul selama bekerja di *Proyek Pesisir*. Sebelum menyatakan diri untuk mengikuti program magang, Anda harus membaca seluruhnya, mulai dari bagian 1 sampai dengan bagian 5.

Buku pedoman ini dapat juga dipergunakan selama menjalani magang, sehingga Anda perlu membawanya. Bila buku pedoman ini belum memberikan informasi yang dibutuhkan, Anda dapat segera menghubungi *Proyek Pesisir* untuk penjelasan lebih lanjut.

2. PROYEK PESISIR

2.1. Apa itu Proyek Pesisir?

Proyek Pesisir (Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir - *The Coastal Resources Management Project* atau CRMP) adalah bagian dari program Pengelolaan Sumberdaya Alam - USAID dengan pemerintah Republik Indonesia. Proyek ini dimulai pada 1997 dan akan berlanjut sampai 2003, sebagai tindak-lanjut konsultasi dengan pihak (instansi/individu) terkait yang berkepentingan dan berhubungan langsung, dalam pengelolaan sumberdaya pesisir Indonesia selama 1995/1996.

Proyek Pesisir bekerja sama dengan para pengguna sumberdaya, masyarakat, industri, kelompok akademisi dan semua jajaran di pemerintahan dan dilaksanakan oleh *Coastal Resources Center* dari *University of Rhode Island*. *Proyek Pesisir* beroperasi di tingkat nasional di dalam kawasan Indonesia.

- Jalur lokal mengembangkan strategi untuk penggunaan sumberdaya pesisir yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini akan ditentukan melalui kerja sama antara masyarakat setempat dan pemerintah.
- Jalur nasional memperkuat kerangka kerja institusi dan sumberdaya manusia untuk pengelolaan sumberdaya pesisir, meningkatkan pengalaman wilayah lokal pada program dan kebijaksanaan nasional, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada para pemegang keputusan dan berbagai kelompok yang berkepentingan.
- Pelaksanaan replikasi dari hasil terbaik pengelolaan sumberdaya pesisir di kawasan pesisir lainnya di Indonesia adalah tujuan jangka menengah. Pelatihan dan materi akan digunakan di seluruh kawasan Asia-Pasifik (lihat brosur *Proyek Pesisir* 1997).

2.2. Misi Proyek Pesisir

Proyek Pesisir adalah satu dari lima komponen Proyek Pengelolaan Sumberdaya Alam II - *The Second Natural Resource Management Project* (NRM II) dari USAID-Pemerintah Indonesia. Tujuan strategis NRM II adalah mendesentralisasikan dan memperkuat pengelolaan sumberdaya alam (USAID, 1996:2). Misi dari *Proyek Pesisir* yaitu untuk mencapai kemajuan yang dapat diukur melalui pendesentralisasian dalam memperkuat pengelolaan sumberdaya alam.

Proyek ini dapat memotivasi institusi untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan pendekatan-pendekatan yang kemudian berlanjut kepada penggunaan sumberdaya. Pengalaman tersebut dapat memberikan implikasi mengenai penggunaan dan praktek-praktek pengelolaan sumberdaya di Indonesia untuk seluruh tingkat pengambil keputusan (pengguna sumberdaya perorangan sampai pada pengambil kebijaksanaan). Pelatihan-pelatihan yang dipelajari dari proyek tersebut akan dapat berkontribusi besar pada praktek-praktek pengelolaan pesisir global.

2.3. Program Magang *Proyek Pesisir*

Proyek Pesisir memberikan peluang kepada para profesional muda Indonesia untuk mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Untuk mencapai tujuan ini *Proyek Pesisir* membuka program magang.

Peserta program magang adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan berniat ingin memperluas pengalaman pribadinya melalui keterlibatan dalam sebuah proyek tanpa digaji. Dengan demikian diharapkan program magang pada *Proyek Pesisir* akan memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap isu-isu mengenai pengelolaan sumberdaya pesisir dan cara praktis dalam menerapkan ilmu, ketrampilan dan pengalamannya.

Peserta program magang diharapkan menjadi anggota dalam tim *Proyek Pesisir* untuk jangka waktu dua sampai enam bulan. Peserta diberi suatu tugas tertentu dan fasilitas untuk menyelesaikannya, termasuk waktu untuk bekerja di lapangan bersama dengan tim lapangan. Melalui kerjasama tim lapangan (dalam perencanaan bulanan, pemantauan reguler, diskusi, supervisi dan memberikan laporan bulanan pada pertemuan staf) serta arahan dari *Field Program Manager* (FPM) atau Manajer Program Lapangan, seorang peserta program magang

diharapkan memberikan hasil yang bernilai bagi proyek. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain adalah mengumpulkan data dan informasi, yang dapat digunakan dalam pembuatan skripsi S1 atau tesis S2.

Proyek Pesisir percaya bahwa dengan hidup di tengah-tengah masyarakat desa bersama tim lapangan serta diskusi antara staf tetap dan peserta program magang, akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Setiap tahunnya, staf Proyek Pesisir akan menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang (atau oleh sekelompok orang) dengan berbagai keahlian selain dari yang dikerjakan oleh tim Proyek Pesisir. Pada rencana kerja tahunan setiap kegiatan akan diagendakan untuk para peserta program magang.

Acuan untuk ketentuan-ketentuan bagi program magang akan dijelaskan oleh FPM dan *Chief of Party (CoP)*/ Pimpinan Tim Proyek Pesisir, selama perencanaan program kerja tahunan pada bulan September setiap tahunnya. Menjelang selesainya perencanaan program kerja tahunan semua program magang yang ditawarkan akan diiklankan pada seluruh jaringan akademik sebagai penawaran kompetitif.

2.4. Latar Belakang dan Sejarah

2.4.1. Latar Belakang *Coastal Resources Center (CRC)*

Kegiatan-kegiatan CRC di Amerika Serikat dan di negara-negara yang sedang berkembang berdasarkan keyakinan bahwa para perencana dan pengelola sumberdaya pesisir dari negara-negara berkembang dan sedang berkembang memiliki banyak hal untuk dipelajari oleh masing-masing pihak. CRC berikrar untuk memainkan peranan penting dalam memformulasikan dan mencoba berbagai jalan keluar bagi beragam masalah penting pada pengelolaan sumberdaya pesisir di seluruh dunia.

Strategi pengelolaan yang diformulasikan oleh CRC selama lebih dari 27 tahun berdasarkan pendekatan :

- Menjamin pembangunan dan konservasi
- Menyertakan keterlibatan secara aktif seluruh pihak terkait dalam menentukan dan bernegosiasi untuk menyelesaikan masalah-masalah demi tujuan di atas.
- Menerjemahkan ilmu yang ada mengenai bagaimana fungsi ekosistem dan sebagai jawaban atas kegiatan-kegiatan manusia.
- Memperkenalkan strategi pengelolaan baru dalam berperilaku yang ditujukan untuk membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat dan mendapatkan dukungan politik yang dibutuhkan guna melaksanakannya.

2.4.2. Sejarah

Pada tahun 1971, Gubernur Rhode Island meminta mahasiswa/i yang telah lulus jurusan Oseanografi dari *University of Rhode Island (URI)* mendirikan *Coastal Resources Center (CRC)* untuk membantu negara dalam memformulasikan strategi guna mengelola garis

pantainya. Pertengahan tahun tujuh puluhan, CRC yang sedang menyiapkan Program Pengelolaan Pesisir daerahnya, membantu Komisi Regional New England dalam memberikan resolusi dari isu-isu yang ditimbulkan oleh pembangunan kilang minyak lepas pantai, dan mempersiapkan Rencana Pengelolaan Wilayah Khusus bagi wilayah kritis secara geografis di Rhode Island.

Pada tahun 1984, sejumlah proyek dalam cakupan nasional, termasuk menjalankan studi pengelolaan inter-disipliner terhadap muara-muara di Amerika Serikat. Program internasional yang utama diawali pada tahun 1985, yakni membantu negara-negara berpenghasilan rendah dalam mengelola wilayah garis pantai dan pesisir mereka.

Isu-isu pertama yang ditujukan kepada CRC di Rhode Island, yaitu pengendalian terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan pada daerah-daerah kritis seperti, pembatas pantai-pantai, lahan-lahan basah, muara-muara, dan danau di laut, kehilangan dan penurunan baku mutu air, dan penyelarasan wilayah-wilayah yang dilindungi ke dalam kerangka kerja yang menyeluruh dari pengembangan dan pengelolaan pesisir - tetap menjadi isu utama yang mendapat perhatian fokus dari CRC di seluruh dunia.

Sejak bertahun-tahun, CRC sudah mengerjakan isu-isu tadi melalui beraneka ragam proyek-proyeknya. Seluruh proyek-proyek CRC, bagaimana pun, berbagi bersama dalam atribut-atributnya. Atribut-atribut dalam melewati batasan-batasan disipliner, bergabung dalam pembuatan kebijaksanaan, informasi teknis, dan penelitian, serta memasukkan komponen pendidikan dan partisipasi publik yang kuat. CRC memberikan jasa sebagai katalisator dalam meraih kerjasama dan koordinasi antar badan serta membangun kemitraan antara publik dan sektor-sektor swasta.

2.4.3. Misi dan Kebijakan CRC

Misi: CRC mengabdikan untuk mengembangkan strategi-strategi, sistem-sistem, dan institusi-institusi dalam rangka mengefektifkan pengelolaan lingkungan pesisir.

Kebijakan

- Memberdayakan individu dan organisasi di seluruh jajaran adalah hal pokok dalam kerja kita di lapangan dan di dalam CRC sendiri
- Menggabungkan perspektif pengalaman nyata dan kekakuan akademik
- Menetapkan integritas dan ikrar sebagai fondasi untuk semua kegiatan
- Secara terus-menerus meninjau, memperbaiki, dan menyesuaikan pandangan kita terhadap pengelolaan pesisir yang efektif
- Mengejar perkembangan yang lebih dari sekedar demi perkembangan itu sendiri; yaitu mengejar kualitas dan inovasi.

2.5. Program Pengelolaan Sumberdaya Alam Fase II. Proyek Kerjasama RI - USAID

Maksud dan tujuan dari program NRM II adalah untuk mendukung rencana pemerintah Republik Indonesia dalam memperkuat institusi-institusi yang ditunjuk, sehingga mereka dapat:

1. Mengidentifikasi kebijaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan praktek-praktek yang menghambat keberlanjutan perkembangan ekonomi; dan
2. Mendesain serta mengimplementasikan kebijaksanaan yang mapan dan praktek-praktek yang menanggulangi hambatan-hambatan.

Kedua hal di atas sangat tersirat di dalam tujuan strategis program NRM II, yaitu mendesentralisasikan dan memperkuat pengelolaan sumberdaya alam (USAID, 1996:2).

2.6. Struktur Organisasi *Proyek Pesisir*

Implementasi dan Organisasi Umum

Proyek Pesisir sedang diimplementasikan oleh sebuah tim proyek Pusat Pengelolaan Pesisir dari *University of Rhode Island*, yang menjalankannya di bawah payung Perjanjian Kerjasama Global USAID Washington dan melalui kerjasama *Rural Environmental Management Office* dari USAID Indonesia (yang bertanggungjawab untuk program NRM II dan yang juga merupakan pokok dari perjanjian terpisah dengan pemerintah Republik Indonesia).

Tim *Proyek Pesisir* bekerja erat dengan para pengguna sumberdaya, pemerintah daerah dan nasional, industri, masyarakat dan kelompok akademis. Hubungan erat tersebut telah terjalin (saat pembuatan konsep dan pada awal kegiatan di tahun 1995 dan 1996) antara tim *Proyek Pesisir* dan mitra kerja Indonesia dengan menyediakan kerangka kerja di mana para pihak terkait dalam pengelolaan sumberdaya pesisir akan secara efektif terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

Misi *Proyek Pesisir* akan tercapai melalui pihak-pihak yang mau bekerjasama secara efektif dan efisien. Kesuksesan ini bergantung pada interaksi efektif dengan mitra kerja proyek sekarang, termasuk Anda dan para pihak terkait.

Menyadari adanya ketergantungan ini, berikut di bawah ini adalah nilai-nilai utama kebijakan yang bisa menjelaskan tentang pekerjaan dari para staf *Proyek Pesisir* dan interaksi dengan orang di luar mereka :

- Pengertian umum yang mendasar dan praktis
- Jujur dan tulus
- Menghargai dan peka
- Terbuka dan bertanggung-jawab
- Jelas dan komunikasi yang konstruktif
- Luwes dan adaptif
- Dapat dipercaya dan bekerjasama

Nilai-nilai di atas harus dipromosikan dalam berbagai kegiatan *Proyek Pesisir* dan membentuk tonggak-tonggak dari sekian kebijaksanaan yang telah ditentukan di dalam buku pedoman ini. Nilai-nilai tersebut harus diperhatikan oleh staf proyek dalam semua hal yang berkaitan dengan keputusan pribadi atau dalam menangani isu-isu yang dapat saja mempengaruhi orang lain terhadap persepsi proyek.

2.7. Pendanaan

Proyek Pesisir didanai dari perjanjian antara pemerintah RI (dalam hal ini BAPPENAS) dengan USAID, yang bekerjasama dalam menentukan anggaran untuk jangka waktu sampai selesainya proyek dan pada setiap tahun fiskal.

Tahun fiskal dimulai dari 1 April sampai dengan 31 Maret. Oleh karena alasan ini maka kegiatan-kegiatan untuk program magang disetujui pada akhir bulan Maret; kemudian diimplementasikan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati, yaitu dimulai paling cepat bulan April.

3. PERATURAN DAN KONDISI UMUM

3.1. Kondisi Pekerjaan

Dalam rangka mengelola sumberdaya manusia, para peserta program magang dan para relawan disejajarkan sama dengan para staf yang dikontrak oleh *Proyek Pesisir* dan keduanya sama-sama memberikan kontribusi berharga bagi misi *Proyek Pesisir*.

Kontrak kerja peserta program magang *Proyek Pesisir* hampir sama dengan kontrak kerja karyawan (staf), yang merinci secara khusus kondisi kerja bagi peserta program magang. Kontrak kerja peserta program magang dibedakan pada :

- a. Jangka waktu kerja magang berkisar antara 1 sampai 3 bulan.
- b. Tidak ada gaji untuk peserta program magang (namun demikian beberapa pengeluaran akan mendapat penggantian).
- c. Informasi yang diperoleh selama mengikuti program magang menjadi hak milik *Proyek Pesisir*. Peserta program magang memiliki akses untuk semua bahan dasar dan data akhir serta dapat digunakan untuk keperluan akademik seperti penyelesaian skripsi S1 dan tesis S2. Salinan skripsi atau tesis yang dihasilkan harus diberikan kepada staf *Proyek Pesisir* yang berwenang di kantor setempat.
- d. Peserta program magang yang bermaksud untuk mempublikasikan hasil-hasil yang didapat selama kerja magang di *Proyek Pesisir* diperbolehkan, asalkan sejalan dengan prosedur penerbitan *Proyek Pesisir*.
- e. Peserta program magang tidak berhak mewakili *Proyek Pesisir*.

3.2. Perpanjangan Kontrak

Program magang biasanya diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kecuali pada situasi tertentu dan bila mendapat rekomendasi dari FPM, Koordinator Program dan CoP. Kontrak untuk peserta program magang dapat diperpanjang (dengan kesepakatan bersama) setiap bulannya sampai mencapai tiga bulan secara keseluruhannya.

3.3. Akhir Kontrak

Hubungan kerja peserta program magang bisa diputuskan oleh :

- a. Pengunduran diri dari seorang peserta program magang. Kapan saja dan dengan alasan

apa pun, seorang peserta program magang dimohon untuk segera memberitahukan *Proyek Pesisir* niatnya untuk mengundurkan diri dan memberitahukannya secara tertulis kepada supervisornya selambat-lambatnya lima belas hari sebelumnya.

- b. Pemutusan kontrak oleh *Proyek Pesisir*. Bila seorang peserta program magang tidak memenuhi klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak kerja magang, maka ia dapat dikenakan PHK. Pemberitahuan tentang pemecatan tersebut akan dikeluarkan secara ringkas oleh supervisor peserta program magang, kemudian ditanda-tangani pula oleh FPM dan disetujui oleh CoP.

3.4. Jam Kerja

Jam kerja yang dibakukan pada *Proyek Pesisir* di kantor Jakarta adalah mulai dari pukul 08:00 sampai dengan 16:00, Senin sampai Jum'at. Sementara untuk kantor propinsi dan kantor desa pada prinsipnya diberlakukan jam kerja yang sama, tetapi waktunya disesuaikan dengan situasi di wilayah setempat. Seluruh staf *Proyek Pesisir* diharuskan bekerja selama sedikitnya 40 jam seminggu dan menjaga ketepatan waktunya, dengan membuat absen setiap harinya.

Kegiatan-kegiatan para peserta program magang dijadwalkan untuk dipergunakan antara 50 sampai 75% dari jam kerja minggunya. Dengan demikian seorang peserta program magang akan menghabiskan sisa waktu kerjanya dengan memanfaatkan pusat sumberdaya di kantor propinsi dan memperluas pengalaman belajarnya selama program magang.

3.5. Apa yang disediakan *Proyek Pesisir*?

Tujuan kerja magang di *Proyek Pesisir* adalah untuk :

- Menyediakan kesempatan bagi para akademisi muda untuk mempraktekkan pengelolaan pesisir di lapangan.
- Memperluas dan menambah ragam sumberdaya *Proyek Pesisir* dengan menjawab berbagai kebutuhan yang ada di dalamnya.
- Meningkatkan kapasitas *Proyek Pesisir* dalam mengembangkan pengalaman dan keahlian akademisi muda Indonesia dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- Menambah pemahaman terhadap tujuan dan metode *Proyek Pesisir* di seluruh Indonesia.
- Memperluas pemahaman tentang *Proyek Pesisir* bagi publik Indonesia.

Proyek Pesisir memberikan hal-hal berikut kepada para peserta program magang:

- Pengalaman praktek di proyek pengelolaan sumberdaya pesisir.
- Memperkenalkan diri ke program internasional yang telah diakui.
- Kesempatan untuk menerapkan pengalaman teoritis ke dalam pengalaman dunia nyata, memadukan kebijakan dan praktek.
- Keterlibatan dalam segala tingkatan pada suatu proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- Meningkatkan ketrampilan menulis, riset kepustakaan dan membaca, komunikasi lisan, serta pengaturan waktu.
- Pengalaman bekerja di lingkungan kantor (ketrampilan yang diperlukan untuk administrasi umum, pertemuan-pertemuan, hubungan antar individu) dan kesempatan untuk membuka

- jaringan dengan para profesional di bidang pengelolaan sumberdaya pesisir.
- Kesempatan untuk membangun jiwa kepemimpinan dan ketrampilan mengelola.

Proyek Pesisir akan menanggung :

- Biaya perjalanan dari universitas ke kantor propinsi *Proyek Pesisir* pada waktu mulai program magang dan pada waktu pulang, setelah kontrak selesai.
- Transportasi lokal yang berkaitan dengan kegiatan.
- Tunjangan hidup (termasuk didalamnya uang saku).
- Asuransi kecelakaan.

3.6. Peraturan Keuangan

Biaya yang menjadi beban *Proyek Pesisir*

1. Biaya perjalanan ke kantor propinsi (pergi - pulang)
2. Transportasi yang berkaitan untuk pekerjaan
3. Tunjangan untuk hidup di daerah, termasuk biaya akomodasi sederhana di wilayah kerja.
4. Dukungan dan koordinasi
5. Asuransi kecelakaan

Pos-pos yang menjadi tanggungan para peserta program magang

1. Ongkos ke dokter gigi
2. Asuransi barang-barang pribadi
3. Biaya kontribusi Jamsostek
4. Liburan
5. Biaya pulang darurat selama masih mengikuti program magang

3.7. Suami/Istri dan Tanggungan

Proyek Pesisir tidak menanggung pasangan atau tanggungan (misalnya anak) dari para peserta program magang. Tidak ada bantuan keuangan yang diberikan kepada para peserta program untuk mengadakan perjalanan bersama keluarga mereka dan tidak ada akomodasi yang disediakan untuk anggota keluarga mereka.

Sebelum peserta program magang memutuskan untuk membawa serta keluarganya, penting baginya untuk berkonsultasi dengan Koordinator Program Magang terlebih dahulu. Dalam keadaan pengecualian, Koordinator Program Magang dapat memberikan ijin tertulis. Sekali pun demikian, segala biaya tambahan yang dikeluarkan untuk keluarga harus menjadi tanggung jawab peserta program magang yang bersangkutan.

3.8. Pelayanan Medis/Kesehatan

Tanggung jawab para peserta program magang adalah menjaga kesehatannya semaksimal mungkin. Pelayanan kesehatan di daerah lokasi kerjanya bisa lebih sederhana dari yang biasa mereka peroleh. Oleh sebab itu sangat disarankan agar peserta program magang mempersiapkan diri dengan peralatan P3K dasar untuk dibawa ke lapangan.

Ada tempat-tempat tertentu di lapangan yang membutuhkan perhatian lebih terhadap unsur higienis dan keamanan. Untuk itu *Proyek Pesisir* mengharapkan peserta program magang menyiapkan diri guna menghadapi keamanan kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini termasuk memastikan bahwa peserta program magang telah divaksinasi dan (kalau dibutuhkan) meminum malaria *prophylactics*.

3.9. Kecelakaan dan Resiko Bahaya

Seluruh peserta program magang dilindungi oleh polis asuransi kecelakaan. Namun demikian adalah kewajiban para peserta program magang untuk mengurangi sekecil-kecilnya resiko bahaya. Mereka harus mengenal betul buku pedoman CRMP bagian C, yang pada dasarnya berisi :

- Segala potensi yang membahayakan harus dilaporkan
- Mereka hanya diperbolehkan menjalankan mesin atau mengerjakan kegiatan sesuai dengan tingkat kualifikasi/sertifikasi mereka. Misalnya, SIM atau sertifikat diving.
- Seluruh staf atau peserta program magang *Proyek Pesisir* memiliki tanggungjawab untuk menolak mengerjakan kegiatan yang dianggap dapat membahayakan mereka atau di mana mereka tidak mempunyai kualifikasi untuk menjalankannya, bila hasilnya bisa membawa resiko bagi kesehatan mereka.

3.10. Pernyataan Resmi

- Semua peserta program magang akan menerima:
- Sertifikat penghargaan atas kegiatannya di *Proyek Pesisir*, bersamaan dengan surat "pernyataan resmi" yang merinci (dalam bentuk surat ringkasan) tentang : jangka waktu dinas mereka.
- Ringkasan dari tugas-tugas mereka; dan
- Rekomendasi atas kompetensi mereka.

4. PILIHAN PESERTA PROGRAM MAGANG

4.1. Kerangka Kerja

Kesempatan program magang yang diberikan *Proyek Pesisir* dalam mendukung para peserta program magang dibatasi oleh keuangan, waktu dan kemampuan tim. Kebijakan proyek adalah sedapat mungkin mencari calon- calon terbaik yang berasal dari Indonesia. Kemudian para peserta program magang akan diseleksi secara kompetitif, untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah ditentukan sesuai dengan langkah-langkah yang secara garis besar dijelaskan dalam gambar berikut ini.

4.2. Langkah-langkah Selama Proses

1. Sekali setahun (biasanya September) tim manajemen *Proyek Pesisir* mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang ingin dijalankan oleh proyek dan cocok untuk dikerjakan oleh

para peserta program magang.

2. *Terms of Reference* (ToR), yang merupakan acuan peraturan digabungkan dalam satu daftar dan diiklankan ke universitas terkait di Indonesia, melalui Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB) c.q. Koordinator Program Proyek Pesisir, pada bulan Oktober/November.
3. Kualifikasi, kerangka waktu dan tingkat pengalaman yang dibutuhkan bagi setiap kegiatan telah ditentukan. Latar belakang informasi tentang *Proyek Pesisir*, tujuan dari program kerja magang dan ToR harus diiklankan kepada institusi terkait secara bersamaan.
4. Peminat ditawarkan untuk menyerahkan gagasan-gagasan mereka (dalam bentuk proposal) ke Koordinator Program Magang Proyek Pesisir-PKSPL - IPB antara November sampai akhir Januari. PKSPL kemudian akan mengadakan seleksi awal.
5. Pada bulan Maret, saat anggaran untuk tahun fiskal berikutnya (mulai bulan April) telah disetujui oleh USAID dan BAPPENAS, sebuah dewan akademik dibawah koordinasi Koordinator Program Proyek Pesisir PKSPL - IPB, dan *Field Program Manager* akan memberikan keputusan akhir tentang para pelamar yang berhasil.
6. Para pelamar yang berhasil akan menerima paket informasi program magang, yang berisi:
 - a. Kontrak kerja
 - b. Buku saku peserta program magang
 - c. Informasi tentang *Proyek Pesisir* dan kantor propinsi setempat.

4.3. Pengunduran Diri Peserta Program Magang

Penarikan diri dari program kerja magang oleh seorang calon dapat merusak keberhasilan rencana kerja tahunan. Sangat penting bagi siapa pun yang dengan alasan apa pun tidak dapat memenuhi pekerjaan magang mereka sesuai agenda yang ditetapkan, agar *sesegera mungkin menghubungi Proyek Pesisir*. Tim manajemen dapat memutuskan kemudian untuk menjadwalkan ulang pekerjaan magang untuk waktu lain atau menawarkannya kepada orang lain.

4.4. Hubungan dengan Media

Seorang peserta program magang berada pada posisi unik dalam menggugah keingintahuan terhadap bermacam isu yang akan dihadapi dan dipelajari dalam menyelesaikan program magangnya. Sangat penting bagi peserta program magang untuk senantiasa peka terhadap kebutuhan *Proyek Pesisir* dalam mengkomunikasikan pesan-pesan yang konsisten kepada media dan melalui pemberitaannya. Semua informasi yang diminta oleh peserta program magang untuk disebarluaskan ke media harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Koordinator Program Magang, FPM atau Publication Manager Proyek Pesisir.

4.5. Penyebarluasan Informasi Proyek Pesisir

Diharapkan bahwa peserta program magang menjadi bagian dari tim *Proyek Pesisir*. Bagi peserta program magang yang berniat untuk menyebarluaskan informasi tentang proyek harus melakukannya melalui kerja sama dengan FPM dan sejalan dengan panduan-panduan *Proyek Pesisir*.

5. KANTOR SETEMPAT

5.1. Hubungan Peserta Magang dengan Kantor Setempat

Selama melaksanakan program magang, sehari-hari Anda akan berhubungan dengan *Proyek Pesisir* dibawah koordinasi PFM setempat. Hubungan sehari-hari Anda yang paling penting adalah dengan *Field Extension Officers (FEO)*, *Senior Extension Officers (SEO)* dan *Technical Advisors (TA)*.

Selaku koordinator semua kegiatan di sekitar daerahnya, FPM bertanggungjawab atas semua orang dan tugas-tugas mereka secara keseluruhan. FPM akan mengkoordinir pertemuan awal/pengenalan dasar, tetapi akan sering mendelegasikan fungsi ini kepada anggota staf yang terkait.

5.2. Tunjangan Hidup Peserta Program Magang

Uang tunjangan hidup peserta program magang (sudah termasuk didalamnya uang saku) ditujukan untuk mencukupi pengeluaran sehari-hari, dan tidak ada hubungan antara jumlahnya dengan jenis, tingkat atau nilai pekerjaan yang dikerjakannya. Uang tunjangan hidup ini bukan merupakan kompensasi terhadap pekerjaannya, namun untuk membantu mereka untuk hidup di lokasi magangnya.

5.3. Perilaku, Penampilan dan Pakaian

Para peserta program magang diharapkan mengikuti norma-norma sosial yang pantas bagi para profesional Indonesia. Pakaian dapat disesuaikan untuk bekerja di lapangan dan di kantor setempat. Setiap saat seluruh peserta program magang *Proyek Pesisir* agar memperhatikan bahwa mereka adalah bagian dari tim, yang memiliki tanggung jawab untuk berpakaian sesuai dan praktis.

5.4. Transportasi dan Biaya ke dan dari Tempat Magang

Transportasi Anda akan diatur untuk perjalanan dari universitas/kota di mana Anda tinggal ke kantor di daerah. Bila peserta program magang direkrut secara lokal, maka digunakan bis umum. Untuk tempat tinggal yang lebih jauh, cara menempuh perjalanan yang paling efisien akan diatur melalui pesawat domestik kelas ekonomi atau kapal Peln.

Transportasi lokal akan diatur sesuai kebutuhan, sekali lagi menggunakan bentuk yang paling nyaman dan efisien. Pada setiap kasus, bon-bon pembayaran akan dibutuhkan untuk mengganti pembayaran. Bila tidak dapat memberikan bon, seorang peserta program magang harus mengisi formulir ganti-rugi dinas.

5.5. Peraturan Keuangan

Dasar dari perkiraan peraturan keuangan kerja magang diatur dalam bagian "Tunjangan

Hidup Peserta Program Magang” di atas. Tarifnya berganti setiap waktu dan tergantung dari tinjauan terakhir. Tarif setempat yang berlaku sekarang (sampai saat ini) adalah Rp. 50.000,- per hari.

5.6. Akomodasi

Proyek Pesisir dapat membantu mencarikan akomodasi lokal di kota tempat kantor propinsi berada atau di lapangan. Biaya akomodasi peserta program magang menjadi tanggungan peserta program magang (sudah termasuk di dalam Uang Tunjangan Hidup).

Kondisi di lapangan biasanya lebih sederhana, yang terdiri dari tempat tidur atau tikar, kadang-kadang berbagi kamar tidur di rumah penduduk desa.

5.7. Laporan Kemajuan Peserta Program Magang

Peserta program magang diharapkan mempersiapkan presentasi awal, menjelaskan sasaran atau tujuan pekerjaan mereka. Tugas ini dikonsultasikan dengan FPM atau staf lain yang ditunjuk dan dipaparkan pada pertemuan bulanan pertama dari peserta program magang di kantor propinsi.

Peserta program magang juga diharapkan dapat menghadiri pertemuan bulanan di kantor propinsi dan menyerahkan laporan kemajuan kegiatannya kepada tim. Perencanaan untuk bulan mendatang harus dibuat melalui diskusi dan koordinasi dengan tim kantor propinsi, terutama dengan FEO yang sehari-harinya harus bekerjasama dengan peserta program magang.

Peserta program magang dan supervisornya akan melengkapi laporan kemajuan tertulis bulanan, yang meringkas bagaimana perkembangan pekerjaan magang. Dokumen-dokumen ini akan digunakan sebagai evaluasi efektivitas program kerja magang dan bila diperlukan, merubahnya.

5.8. Laporan Akhir

Peserta program magang diharapkan menyerahkan laporan akhir seperti yang disepakati di ToR oleh peserta program magang, Koordinator Program Magang dan *Field Program Manager*.

5.9. Presentasi Pada Saat Magang

Dalam rangka memperluas jangkauan informasi di dalam proyek, peserta program magang diharapkan menyiapkan presentasi pada pertemuan bulanan terakhir yang akan dihadapinya. Pada presentasi tersebut, ia harus memaparkan ringkasan dari pekerjaan yang telah diselesaikannya berikut analisa awalnya. Ada kemungkinan bagi peserta program magang untuk memberikan umpan-balik berdasarkan pengalamannya mengikuti program magang, efektivitas kerja tim dan rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan proyek di kemudian hari. Pada akhir seminar nanti, ia akan menerima sertifikat resmi dari *Proyek Pesisir*.

5.10. Cuti, Liburan dan Absen lainnya dari Pekerjaan

Para peserta program magang berhak atas libur nasional Indonesia dan hari libur lainnya, sesuai dengan agenda kerja yang disepakati pada awal bulan. Ijin meninggalkan pekerjaan di luar hari libur resmi harus sepengetahuan dan seijin Supervisor.

5.11. Menerima Pekerjaan Lain, di Luar dari Tugas Magang

Pekerjaan yang ditugaskan kepada seorang peserta program magang diharapkan dapat mengisi 50 sampai 75% waktunya. Ini dimaksudkan agar ia menggunakan sisa waktunya untuk memperdalam dan memperluas pemahamannya tentang konsep pengelolaan sumberdaya pesisir yang berasal dari masyarakat setempat. Selain itu dalam kesempatannya bekerjasama dengan tim di lapangan, ia akan memiliki akses ke pusat sumberdaya *Proyek Pesisir* di kantor setempat. Diperkirakan bahwa peserta program magang akan sangat sibuk untuk bisa mencari pekerjaan di luar dari tugasnya. Walaupun demikian, bila ia masih merasa perlu tambahan pekerjaan, hal ini harus mendapat persetujuan tertulis dari FPM sebelum pekerjaan lain tersebut dimulai.

5.12. Keadaan Darurat di Rumah Saat Sedang Kerja Magang

Dalam keadaan luar biasa, FPM dapat mengizinkan peserta program magang pulang ke rumah. Jumlah waktu yang diberikan harus disetujui secara tertulis oleh FPM, sebelum ia meninggalkan kantor setempat. Peserta program magang bertanggungjawab penuh atas segala biaya yang ditimbulkannya, selama perjalanan pulang dan sementara pergi dari wilayah proyek.

5.13. Kondisi Darurat Bukan Medis di Luar Negeri

Proyek Pesisir menghormati stafnya sebagai bagian proyek yang sangat berharga. Merupakan tanggung jawab FPM untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman. Peserta program magang tidak diperkenankan melakukan tindakan yang berbahaya dan harus melaporkan segala resiko yang dapat membuatnya berada dalam bahaya kepada FPM. Peserta program magang juga perlu memiliki kualifikasi yang diakui untuk tingkatan yang sesuai dalam menjalankan mesin-mesin, mengendarai atau menyelam dalam setiap kegiatan proyek. Setiap peserta program magang harus meminta salinan kebijakan *Proyek Pesisir* untuk keamanan sebelum bekerja di lapangan (Buku saku CRMP bagian C2).

Pada peristiwa keresahan massa, FPM akan mengambil keputusan untuk mengurangi kegiatan dilapangan dan merelokasi posisi keamanan. Peserta program magang harus tunduk pada instruksi atau menyerahkan kesepakatan tertulis untuk dibebaskan dari tanggung jawabnya di *Proyek Pesisir* atas segala kejadian.

5.14. Kerja Magang sebagai Bagian dari Proyek Pengembangan Berjalan

Proyek Pesisir menghargai masukan dari peserta program magang, baik selama program magang maupun rencana ke depannya. Masukan dari peserta program dapat ditindak lanjuti

segera oleh tim FPM dan FEO. Tapi umumnya, bila hal itu berkaitan dengan implikasi keuangan, maka baru akan dibawa sebagai pertimbangan pada persiapan rencana kerja tahunan, yang akan efektif pada bulan September setiap tahunnya dan akan digabungkan dengan rencana kerja pada tahun fiskal berikutnya (April tahun depan).

6. KEHIDUPAN SETELAH PROGRAM MAGANG

6.1. Pembayaran Tunjangan Hidup yang Tertunda

Merupakan tanggung jawab Administration Manager untuk memberikan tunjangan hidup dan uang transport sebelum berakhirnya program magang. Juga merupakan tugas FPM (atau staf yang ditunjuk) untuk mengatur perjalanan kembali peserta program magang seperti pada waktu pemberangkatannya (bagi peserta program magang Indonesia). Setelah kedua belah pihak menyetujui segala urusan pembayaran yang telah dilunasi, FPM harus membuat rancangan surat persetujuan (lihat Buku saku CRMP Lamp. B2-7), yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa keduanya telah memenuhi pertanggungjawaban keuangan mereka.

6.2. Perjalanan Kembali Pulang

FPM (atau staf yang ditunjuk) akan mengatur perjalanan pulang peserta program magang setelah menyelesaikan kontraknya. Peserta program magang lokal (yang berasal dari propinsi yang sama dengan lokasi kantor) bisa menggunakan bis umum, untuk peserta yang berasal dari daerah yang lebih jauh bisa menggunakan pesawat kelas ekonomi atau dengan kapal laut. Proyek tidak akan memberikan dalam bentuk uang tunai untuk perjalanan ini, karena hal ini tidak sesuai dengan peraturan anggaran dan audit proyek.

6.3. Asuransi Kecelakaan

Asuransi kecelakaan yang disediakan *Proyek Pesisir* tidak akan berlaku lagi pada hari peserta program magang tiba di rumahnya atau di kota di mana universitasnya berada. Tanggal tersebut harus disepakati sebelumnya oleh peserta program magang, FPM dan *Incune & Intern Assistant (Bogor)*.

6.4. Wawancara Sebelum Keluar

Selain seminar yang harus dipersiapkan dan dipresentasikan oleh peserta program magang, ia akan diwawancarai oleh FPM sebelum menyelesaikan program magang. Saat wawancara, FPM akan mencatat masukan-masukan dari peserta program magang. FPM harus melengkapi Laporan Evaluasi Staf dan Perkembangan Profesional (lihat Buku saku CRMP Lamp. B2.8).

7. KEMBALI BEKERJA

7.1. Penyelesaian

Sebagian besar tugas yang diberikan kepada para peserta program magang diharapkan telah dilengkapi sebelum peserta program meninggalkan lokasi setempat. Bila hal ini tidak dimungkinkan, ia harus menyetujui kerangka kerja baru untuk penyelesaian kerjanya bersama supervisor dan FPM-nya.

Andaikata peserta program magang sedang menulis skripsi dari hasil kerjanya, maka salinan skripsi tersebut harus dikirimkan ke kantor propinsi sesegera mungkin setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Akan diberikan biaya sekedarnya sebagai pengganti biaya fotokopi.

7.2. Alumni Proyek Pesisir

Apabila ternyata terdapat keinginan yang cukup besar dari para peserta program magang, mereka dapat mendirikan dan menjalankan kelompok alumni, yang bertujuan untuk memelihara kontak hubungan satu dengan yang lain sejalan dengan perkembangan karirnya. Alumni program magang diharapkan tetap berhubungan dengan proyek, dengan membaca kalawarta atau akses ke *homepage*.



BAPPENAS

